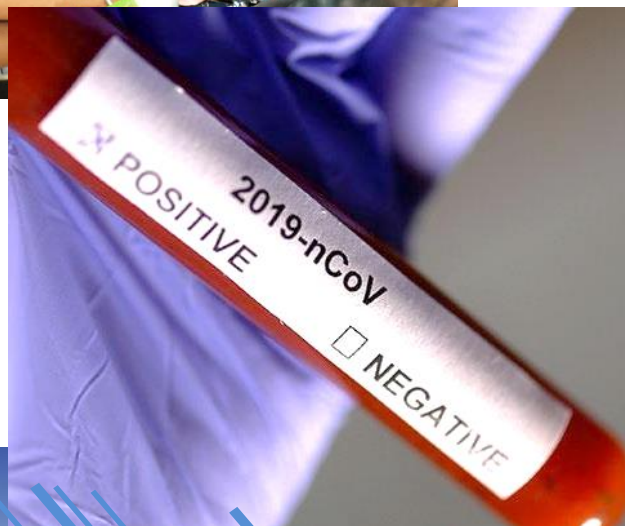




LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2020



BAPPEDA PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanallahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota pada Triwulan II tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mengetahui tingkat capaian program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, dan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2020, terdapat 231 program prioritas yang dilaksanakan oleh 46 perangkat daerah. Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan hasil rekapitulasi kinerja Perangkat Daerah Provinsi NTB. Dari 46 Perangkat Daerah yang ada, sebanyak 44 Perangkat Daerah telah melaporkan sedangkan sisanya sebanyak 2 Perangkat Daerah belum menyampaikan laporan. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II, rata-rata capaian kinerja program dari 44 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah mencapai 47,39 persen dengan kategori sangat rendah, sedangkan rata-rata capaian keuangan mencapai 33,39 persen (kategori sangat rendah), capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan I sebelumnya yaitu sebesar 24,64 persen dengan kategori sangat rendah untuk capaian kinerja, sedangkan rata-rata capaian keuangan mencapai 11,70 persen (kategori sangat rendah).

Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada Triwulan II sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2020. Selain itu, adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau refocusing anggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Transfer sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.07/2020 serta surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan

Nomor 177KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019).

Adapun kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 90 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 3 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 12 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator atau 13,33 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Balita Stunting dan Gini Ratio. Sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 10 indikator tercapai atau 11,11 persen, 12 indikator atau 13,33 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 68 indikator atau 75,56 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Juli 2020

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660901 199001 1 001

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan 2

1.4 Sasaran 2

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 2

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 4

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2020 4

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 9

 a) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020 9

 b) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020 12

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020..... 15

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 TRIWULAN II 29

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2019 29

4.2 Permasalahan 31

BAB V : PENUTUP 39

5.1 Kesimpulan 39

5.2 Rekomendasi 40

LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas RPJPD (periode 20 tahun), RPJMD (periode 5 tahun) dan RKPD (periode 1 tahun). Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Sebagai wujud dalam memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan maka BAPPEDA Provinsi melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan, dan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya untuk dilaporkan ke Gubernur untuk selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi RKPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2020.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Triwulan II ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2020;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian program/kegiatan sampai dengan Triwulan II sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2020.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020, bab ini berisi tentang prioritas dan sasaran RKPD Tahun 2020;
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan RKPD Tahun 2020.

- Bab IV : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020 Triwulan II, bab ini berisi tentang capaian program baik kinerja maupun anggarannya pada 46 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang merupakan tahun kedua dalam perwujudan NTB Gemilang. Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB tahun 2020 yang ada dalam dokumen RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2020

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

- Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
- Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
- Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
- Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
- Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB pada setiap misi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	167,01
				Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	100
		Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	77,14
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	78,64
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
					Nilai SAKIP	BB
					Indeks Profesionalisme ASN	0,67
					Persentase Kerjasama Daerah	100
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	11,35

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,49
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,87
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,84
			Indeks Kebahagiaan			71,9
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62
					Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,16
			Persentase Balita Stunting	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	31,49
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			57,19
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	25,25
					Indeks Kualitas Udara	88,53
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,13

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
	berkelanjutan				Neraca pengelolaan sampah (%)	54
				Meningkatnya Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,5
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam			5,0 - 5,5
				Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	16.800
				Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26
			Pertumbuhan Industri	Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	4,04
			Inflasi			3,0 - 4,0
				Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	9.996
			Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio	0,366
			Angka Kemiskinan			12,75
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	75
					Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100
				Terpenuhinya pelayanan dasar	Cakupan Air Minum	75,74

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72
					Rasio Elektrifikasi	95,09
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,60
				Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	825.043,71
				Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	4.400.000
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas			15,65
			Indeks Demokrasi			76,70
				Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demokrasi	Indeks Kriminalitas	15,65

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,45
				Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,67

Sumber : RKPD Tahun 2020

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019 dan tahun berjalan;
- 2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional;
- 3. Sasaran pokok arah kebijakan periode kelima pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

- 1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
- 2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
- 3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

a) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024 Joko Widodo - Ma’ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi

ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

RKP Tahun 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima PN yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Kelima PN tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

b) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada

penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengambil tema **"Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari"**.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2020 yaitu:

1. Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah, dengan program prioritas meliputi :

- a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.
- b. Mitigasi bencana.
- c. Infrastruktur dasar.
- d. Infrastruktur kawasan.
- e. Konektivitas wilayah.
- f. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas telekomunikasi.

2. Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pengentasan Kemiskinan
- d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- e. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia dan NTB juara.

3. Inovasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan investor sektor riil
- b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- c. Pengembangan Pariwisata
- d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju, UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99 desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.

4. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB zero waste, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah

5. Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs centre, Research Based Policy, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah pertemuan, NTB satu data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2020 yaitu **"Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari"**.

Rencana Kerja selanjutnya disusun melalui sistem entebePlan (<http://e-planning.ntbprov.go.id/>) sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam penyusunan rencana kerja, selain memperhatikan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh proses Musrenbang sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Adapun Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			1,642,709,413,250
	PENDIDIKAN			362,239,819,913
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			362,239,819,913
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs ; Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI ; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs ; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI ; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs ; Angka DO SD/MI ; Angka DO SMP / MTs	100; 99,98; 107; 110; 79,47; 99,74; 98,64; 0,07; 0,14	49,689,125,296
2	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) ; Persen Penurunan	100; 99,98; 107; 110; 79,47; 99,74; 98,64; 0,07; 0,14	39,652,425,383

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
		Angka Drop Out (DO) ; Persentase Akreditasi SMA minimal B ; Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah		
3	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) ; Persen Penurunan Angka Drop Out (DO) ; Persentase Akreditasi SMK minimal B ; Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah ; Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi ; Rasio Siswa SMK terhadap SMA	100; 99,98; 107; 110; 79,47; 99,74; 98,64; 0,07; 0,14	25,505,030,004
4	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) ; Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi	69%; 45 orang	8,834,878,165
5	Program Pembinaan Ketenagaan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah ; Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB ; Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV ; Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV ; Kepala Sekolah bersertifikat ; Pengawas Sekolah bersertifikat ; Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	18; 15; 100; 99,52; 60; 40; 250	4,666,084,775
6	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan	1 dokumen	692,513,400
7	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB		214,129,821,700
8	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	90	1,216,922,670
	KESEHATAN			366,171,672,964
	Dinas Kesehatan			79,635,417,238
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	96,5	1,035,088,000
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	1,510,278,002
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	60%	705,169,697
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	31,49%	9,284,388,792
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat tempat Umum yang Memenuhi Syarat	78%	168,393,200
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Paripurna	2,276,198,000
7	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	21,74%	602,387,000
8	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	55%	40,000,000,000
9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	97%	369,326,010
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100%	1,025,484,288
11	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	55%	389,726,740

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
12	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72	2,145,570,562
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100	1,478,154,190
14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan		42,000,000
	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			203,502,939,526
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	40%	4,489,878,621
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular	40%	205,009,686
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi	Paripurna	615,029,060
4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21,74%	812,943,325
5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	78%	15,173,602,432
6	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	70%	2,418,658,311
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan	38,42	173,981,947,443
	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			33,366,759,023
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	100%	1,413,863,422
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	100%	10,064,000
3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	83%	3,748,832,812
4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100%	125,000,000
5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD	100%	18,200,000,000
	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir			49,666,557,177
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat	100%	173,983,536
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	100%	115,186,829
3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	83%	4,233,584,400
4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100%	300,000,000
5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD	100%	29,500,000,000
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			772,861,464,209
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			772,861,464,209
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	86,65%	501,589,876,020
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	86,65%	65,687,812,000
3	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Rencana program	2 dokumen	275,000,000
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	57,07	12,043,805,386

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	Jaringan Pengairan lainnya			
5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung	4,91	647,960,000
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum ; Cakupan sanitasi	75,74; 69,32	65,783,200,000
7	Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir	466	1,289,000,000
8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	24,03	20,687,480,997
9	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	10	378,614,725
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali	100	5,419,065,000
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	18,18	476,119,000
12	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	88,45	408,220,000
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penurunan Penyimpangan tata ruang	20	1,185,130,000
14	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan	5	147,749,000
15	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor	5	94,917,000
16	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah	5	95,372,000
17	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji	110 jenis	371,722,999
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			98,238,581,734
	Dinas Perumahan dan Permukiman			98,238,581,734
1	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74%	10,924,150,284
2	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	100	618,436,029
3	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	5,18	84,136,817,812
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			17,541,474,464
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			11,717,837,000
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya	20%	549,200,000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Penurunan Konflik Sosial	21%	6,120,999,000
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	10 desa	2,103,870,000
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah		1,106,110,000
	Satuan Polisi Pamong Praja			4,205,061,762
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	100%	488,328,099
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	100%	1,108,933,920
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	354,851,997

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB		100%	1,618,575,702
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	20%	1,192,642,640
2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) ; Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi	100% 40%	30,003,000
	SOSIAL			25,656,399,966
	Dinas Sosial			25,656,399,966
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2,04%	3,678,380,000
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,90%	1,740,082,200
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	696,890,000
4	Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	56,5	792,705,000
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			144,767,534,829
	TENAGA KERJA			6,342,107,279
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			6,342,107,279
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	86	325,797,400
2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	71	141,554,950
3	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100	77,389,800
4	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	91	1,386,401,500
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3,968,517,439
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3,968,517,439
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	62,22	135,250,000
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	60	1,270,450,000
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	62,41	487,460,000
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,110	928,975,000
	PANGAN			7,534,349,739
	Dinas Ketahanan Pangan			7,534,349,739
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,65	5,476,384,400
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	86,96	168,103,463

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	PERTANAHAN			192,583,000
	Sekretariat Daerah			192,583,000
	Biro Pemerintahan			192,583,000
1	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	100	192,583,000
	LINGKUNGAN HIDUP			20,329,972,554
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			20,329,972,554
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase penanganan sampah	15%; 60%	8,216,993,872
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	4 lokasi	1,270,201,900
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1,412,555,000	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	0,82	1,412,555,000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			4,955,900,800
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4,955,900,800
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	55%	416,605,000
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	88%	1,416,310,500
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	55%	347,040,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih	52%	622,916,900
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	40%	277,060,000
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,548,660,000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1,548,660,000
1	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	82,38	189,200,000
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	20,57	298,500,000
3	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri	21,93	308,110,000
4	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	67,67	102,600,000
5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	1,89	78,700,000
6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS	100	95,300,000
7	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	19,2	420,700,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
8	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	2,8	55,550,000
	PERHUBUNGAN			40,181,365,000
	Dinas Perhubungan			40,181,365,000
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW	55,17	703,224,000
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	100	320,096,000
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	79,76	1,361,819,410
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	50	30,000,000,000
5	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	3,08	1,345,428,600
6	Program Peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas	20	168,316,800
7	Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	5	1,182,100,300
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10,847,828,841
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			10,847,828,841
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi	75	2,573,354,636
2	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi Informatika	55	434,244,985
3	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif	5	2,776,481,944
4	Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3	2,433,785,980
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			8,911,909,818
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			8,911,909,818
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	45	135,622,000
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM	18,37	1,040,518,300
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	0,3	358,538,800
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas terhadap koperasi aktif ; Persentase Koperasi Aktif	68,65	1,370,700,000
	PENANAMAN MODAL			3,317,134,248
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3,317,134,248
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi	19	1,323,008,211
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	16.800	767,098,096
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			16,684,660,197
	Dinas Pemuda dan Olahraga			16,684,660,197
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	70	437,249,930

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	8	1,426,653,799
3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	68,07	509,694,000
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100	6,983,494,979
5	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	40	5,027,858,992
	STATISTIK			1,742,443,078
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			1,742,443,078
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	70	1,742,443,078
	PERSANDIAN			1,420,591,593
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			1,420,591,593
1	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi	33	1,420,591,593
	KEBUDAYAAN			8,617,923,283
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			8,617,923,283
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	100	751,507,875
2	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	100	1,422,844,400
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	100	2,820,186,114
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni	100	205,000,000
	PERPUSTAKAAN			6,287,649,210
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			6,287,649,210
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	1.089.000	922,110,000
	KEARSIPAN			471,383,750
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			471,383,750
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100	138,275,000
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo	50	123,359,750
3	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	100	70,851,000
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi	145 orang	112,251,000
5	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD	21 OPD	26,647,000
	URUSAN PILIHAN			255,483,665,464
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			19,333,899,558
	Dinas Kelautan dan Perikanan			19,333,899,558
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	0,91	1,580,414,068
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	1.171.670 ton	1,214,975,000
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	234.799 ton	2,034,850,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	36,92	1,154,230,000
5	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,087	647,522,500
	PARIWISATA			25,128,039,453
	Dinas Pariwisata			25,128,039,453
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	4.400.000	2,525,822,500
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	28,57	10,177,300,000
3	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	34,38	907,355,000
4	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap	2,95	3,643,004,994
5	Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,50	4,949,999,999
	PERTANIAN			126,811,294,570
	Dinas Pertanian dan Perkebunan			108,163,774,457
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100	6,000,000,000
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar); Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering); Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan); Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering)	2	60,273,149,200
3	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang ditingkatkan Kapasitasnya	31,75	3,090,662,000
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			18,647,520,113
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	< 1	314,113,000
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak		11,480,310,745
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	75%	103,071,000
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	100 kelompok	196,404,665
	KEHUTANAN			48,719,923,178
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			48,719,923,178
1	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	0,0012%	1,293,342,700
2	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	31,69% 5,08%	1,658,650,360
3	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis	32,30%; 0,53%	1,509,585,900

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			11,040,313,491
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			11,040,313,491
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	4%	803,592,000
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	95%	3,924,103,714
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	425 KK	2,069,870,000
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	90%	97,849,100
5	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3	662,499,997
6	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT	6,62%	1,822,500,000
	PERDAGANGAN			13,086,673,148
	Dinas Perdagangan			13,086,673,148
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	73%	866,229,826
2	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor	24%	122,543,453
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (Cakupan UKM yang sudah bermitra dibagi total UKM dikali 100)	49,50%	761,956,990
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	6%	855,752,500
5	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	11,11%	7,182,146,560
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Peningkatan Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra	55%	523,198,000
	PERINDUSTRIAN			11,253,142,526
	Dinas Perindustrian			11,253,142,526
1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	13,46%	94,000,000
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	3,83%	384,900,000
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	5,02%	857,275,000
4	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	6,96%	252,750,000
5	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra	70 IKM	717,995,000
6	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	1,23	156,315,000
	TRANSMIGRASI			110,379,540
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			110,379,540
1	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran	85%	110,379,540

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			328,505,937,055
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
	Sekretariat Daerah			63,823,984,345
	Biro Umum			14,416,521,393
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	2,322,405,993
	Biro Organisasi			3,936,105,069
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi ; Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	15 unit; 80%	232,798,000
2	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	100%	63,121,000
3	Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	100%	272,075,500
4	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	75%	1,291,464,999
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata	90%	395,668,900
6	Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik	90%	59,513,000
7	Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik	80%	46,556,000
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun	100%	736,311,000
9	Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	75,245,000
10	Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80	36,590,000
11	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	2 inovasi	70,540,000
	Biro Hukum			1,997,044,836
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	100%	574,200,000
2	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	100%	670,073,940
	Biro Pemerintahan			3,068,899,805
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	100%	248,346,000
2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata	10 kab/kota	1,330,556,000
3	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan	100%	76,205,319
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	100%	579,722,686
	Biro Perekonomian			1,808,748,155
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD	100%	105,057,000
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah		534,286,000
3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	16.800	183,301,200
4	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	100	161,216,700

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP			4,999,209,627
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3	3,442,170,998
2	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)	100%	777,539,999
	Biro Kesejahteraan Rakyat			9,026,510,000
1	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	100%	6,378,794,000
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	100%	178,801,000
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS	100%	175,000,000
4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	100%	108,579,000
5	Program Pengendalian Penduduk dan KB	Rasio Akseptor KB dan Penduduk	75	90,000,000
6	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi	100%	318,088,000
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra	1 kali	376,194,000
8	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	100%	31,633,000
9	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS	100%	517,218,000
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan	100%	28,997,000
11	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif	100%	58,856,000
	Biro Humas dan Protokol			22,786,265,400
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	7,617,132,000
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	90%	6,275,533,000
3	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	89%	5,041,063,000
	Biro Administrasi Kerjasama			1,784,680,060
1	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	100%	18,000,000
2	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	100%	17,700,000
3	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	100%	537,550,000
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			83,697,591,002
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD ; Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti	41,18% 90%	67,545,981,826
	Badan Penghubung Daerah			6,301,435,737
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-		53,333,984
2	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta	548.307	548,306,472

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	PENGAWASAN			14,527,890,500
	Inspektorat			14,527,890,500
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ; Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)	84% 25,17%	3,436,296,600
2	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	40%	737,574,200
3	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu ; Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK ; Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM	94% 13,33% 8,88%	3,061,508,600
4	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	53,33%	83,274,800
5	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP, ; Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	Level III 57%	386,970,600
	PERENCANAAN			31,846,147,330
	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			31,846,147,330
1	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia	100%	802,198,800
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	100%	6,031,233,800
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi	100%	2,500,215,528
4	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya	100%	3,107,087,400
5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	7,828,368,698
6	Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	65%	738,750,000
	KEUANGAN			95,135,779,479
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			57,755,006,350
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB ; Opini laporan keuangan Prov. NTB	Tepat Waktu WTP	27,195,290,242
2	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota	Tepat Waktu	1,699,252,120
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD	PAD Meningkat	1,420,000,000
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			37,380,773,129
1	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi	85%	233,630,000
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	49,33%	6,263,705,758

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	KEPEGAWAIAN			15,639,635,864
	Badan Kepegawaian Daerah			15,639,635,864
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN ; Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN ; Kriteria Penilaian Kinerja ASN	2,45 0,0053% BAIK	9,314,710,740
2	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	100%	261,393,500
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			14,472,472,798
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			14,472,472,798
1	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Bersertifikat	11,35%	8,671,768,081
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3,061,000,000
	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			3,061,000,000
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	21%	3,061,000,000

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 TRIWULAN II

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2020

Perangkat Daerah yang dievaluasi adalah sebanyak 46 Perangkat Daerah dan adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja menurut perangkat daerah sebagaimana disajikan pada tabel laporan Triwulan II tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2020

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31,88	33,25	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Dinas Kesehatan	55,15	20,80	RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Rumah Sakit Umum Daerah	75,00	25,19	SEDANG	SANGAT RENDAH
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	41,23	33,21	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Rumah Sakit H,L, Abdul Kadir Manambai	38,19	37,05	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49,54	28,14	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	39,28	37,76	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	60,38	26,15	RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Satuan Polisi Pamong Praja	55,21	32,82	RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50,00	31,07	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Dinas Sosial	49,07	21,12	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53,25	27,00	RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	38,25	34,69	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Dinas Ketahanan Pangan	41,99	15,61	SANGAT RENDAH	BELUM MELAPOR
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39,86	17,05	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,	44,55	22,89	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6	Dinas Perhubungan	62,02	34,23	RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	30,83	22,47	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	44,85	40,98	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44,71	60,74	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	44,76	36,91	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47,22	39,34	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
C	URUSAN PILIHAN				
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	54,40	23,23	RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Dinas Pariwisata	-	-	BELUM MELAPOR	BELUM MELAPOR
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	50,00	34,61	RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27,86	41,99	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38,03	20,60	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Perdagangan	45,83	42,80	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Perindustrian	0,00	1,04	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
D	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG				
1	Biro Umum	61,15	60,95	RENDAH	RENDAH
2	Biro Organisasi	42,83	31,97	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Biro Hukum	69,87	40,79	SEDANG	SANGAT RENDAH
4	Biro Pemerintahan	41,67	23,73	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Biro Perekonomian	15,38	14,61	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Biro Adm, Pembangunan dan LPBJP	58,33	54,13	RENDAH	RENDAH
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	33,65	57,33	SANGAT RENDAH	RENDAH
8	Biro Kerjasama	54,10	30,73	RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Biro Humas dan Protokol	27,10	25,64	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Sekretariat DPRD	37,50	21,69	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Badan Penghubung Daerah	41,35	40,16	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
12	Inspektorat	60,67	32,84	RENDAH	SANGAT RENDAH
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	56,21	22,46	RENDAH	SANGAT RENDAH
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75,93	34,04	SEDANG	SANGAT RENDAH
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	47,83	26,39	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
16	Badan Kepegawaian Daerah	61,89	71,35	RENDAH	SEDANG

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69,60	38,67	SEDANG	SANGAT RENDAH
KATEGORI		47,39	33,39	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
E	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB				
1	Kota Mataram	TIDAK MELAPORKAN			
2	Kota Bima	TIDAK MELAPORKAN			
3	Kabupaten Lombok Barat	MELAPORKAN			
4	Kabupaten Lombok Utara	TIDAK MELAPORKAN			
5	Kabupaten Lombok Tengah	TIDAK MELAPORKAN			
6	Kabupaten Lombok Timur	TIDAK MELAPORKAN			
7	Kabupaten Sumbawa Barat	TIDAK MELAPORKAN			
8	Kabupaten Sumbawa	TIDAK MELAPORKAN			
9	Kabupaten Dompu	TIDAK MELAPORKAN			
10	Kabupaten Bima	TIDAK MELAPORKAN			

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan II sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. Permasalahan dan Rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan II Tahun 2020

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG	TINDAKLANJUT YANG
----	----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

				DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas	1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke III dan ke IV	1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3. Percepatan proses APBD Perubahan	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua program yang ada di RKPD dan renja terdapat didalam RPJMD	Regulasi kucuran anggaran dana DAK yang menjadi kebijakan PMK adalah kucuran dana sekaligus sehingga menghambat pembayaran dan menyebabkan akan terjadi tuntutan perdata pada PPK sebagai pelaksana karena tidak bisa membayar dalam jangka waktu 14 hari		
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Peningkatan pelayanan yang bermutu baik melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan penjangkauan oleh tim keswamas	1) Beberapa dokumen kegiatan masih dalam proses pengajuan; 2) Adanya refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang di tunda pelaksanaannya dan mempengaruhi target kinerja.	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal
5	Rumah Sakit H,L, Abdul Kadir Manambai	-	-	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembinaan, Motivasi Etos Kerja dan Pengarahan dari Eselon II	Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4,0 ke 4,3	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi	Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1) Sumber daya aparatur yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik ; 4) Pengawasan yang efektif dan transparan,	Masih Kurangnya anggaran Oprasional	-	-
9	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
11	Dinas Sosial	-	-	-	-
B URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1) Sumber daya aparatur yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik; 4) Pengawasan yang efektif dan transparan	Masih Kurangnya anggaran Oprasional	-	-
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
3	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terjalannya koordinasi baik dalam internal maupun dengan instansi/mitra/ pihak luar	Adanya restrukturisasi anggaran akibat kondisi Covid menyebabkan terhambatnya pencairan dana kegiatan	1) Meningkatkan koordinasi pemantauan kualitas lingkungan dengan Dinas LH kab/kota, mengencangkan sosialisasi dan pembinaan pengawasan kepada unit usaha agar taat terhadap kewajiban dalam dokumen lingkungan; 2) meningkatkan koordinasi dengan KPH se-NTB,	Memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
				meningkatkan pemahaman regulasi dan tata cara teknis penanaman RHL dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan kepada KTH; 3) Memberikan pemahaman teknis dan regulasi terkait pengamanan hutan kepada personil di tingkat tapak ; 4) meningkatkan koordinasi dengan Unit Gakkum KemenLHK dalam rangka penyelesaian kasus tipihut, meningkatkan koordinasi persiapan SeaBrNet dengan instansi/pihak terkait	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
6	Dinas Perhubungan	Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait	Belum optimalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait	Meningkatkan kinerja , SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan,
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian target Triwulan II	Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat Wabah COVID 19	Merubah pemantauan lapangan/perusahaan dengan metode video conferences atau teleconferences jika wabah COVID masih berlangsung	Mereviu kembali target yang telah ditetapkan dan memperbaiki strategi pencapaian target indikator kinerja kunci
10	Dinas Pemuda dan	Ilmu pengetahuan yang	Belum terjalin koordinasi yang baik	memastikan pelaksanaan	Menyusun rencana kerja

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
	Olahraga	terus berkembang, Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim,	antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota, , jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana & dana yang masih kurang	program/kegiatan sesuai dengan jadwal	berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA	Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor	Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan	Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran
C	URUSAN PILIHAN				
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	koordinasi dan Kerjasama yang intens dengan penyuluh serta dukungan anggaran dari NGO dalam pelaksanaan program dan kegiatan selain dukungan anggaran dari APBN	monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan tahun sebelumnya belum dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir masalah pada pelaksanaan tahun berjalan	menjadikan hasil evaluasi sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan	melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu diawal tahun sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan
2	Dinas Pariwisata	BELUM MELAPORKAN	BELUM MELAPORKAN	BELUM MELAPORKAN	BELUM MELAPORKAN
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1) Terbangunnya Koordinasi pada jajaran Pengelola Keuangan serta instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait,	Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi	-	Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1) Pengadaan kegiatan bansos senilai 6M belum terealisasi karena di relokasi dari DPA murni ke DPA perkada 5 yang pelaksanaannya di laksanakan di triwulan III; 2) Kegiatan yang bersumber dari	1) Kegiatan bansos tidak dilakukan verifikasi dan proses pengadaan tidak dilakukan dengan penyusunan HPS dan percepatan kelompok; 2)	-

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
			dana DAK senilai 1,1 M belum bisa dilaksanakan karena per tanggal 28 Maret 2020 berdasarkan surat kemenkeu dan belum bisa dimasukkan dalam aplikasi dan omspan; 3) Capaian kinerja dan anggaran RPJMD TA 2020 masih rendah dikarenakan terjadi refocusing anggaran akibat penanganan pandemi Covid 19 sehingga mengurangi target output dan anggaran yang dilaksanakan.	Kegiatan DAK sudah berkoordinasi dengan BPKAD terkait pelaksanaan selanjutnya	
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
6	Dinas Perdagangan	'Komitemen Pimpinan dalam Penanganan Masa Pandemi	Refocussing anggaran beberapa kegiatan	Identifikasi Kegiatan- Kegiatan Prioritas yang mendukung capaian RPJMD	'Revisi Target Program
7	Dinas Perindustrian	-	-	-	-
D	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG				
1	Biro Umum	-	-	-	-
2	Biro Organisasi	-	-	-	-
3	Biro Hukum	Tertibnya administrasi dan keuangan,	Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan,	menata administrasi dan keuangan sesuai rencana	perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang,
4	Biro Pemerintahan	-	-	-	-
5	Biro Perekonomian	-	-	-	-
6	Biro Adm, Pembangunan dan LPBJP	Adanya regulasi percepatan anggaran dan Koordinasi yang intens dengan Kepala SKPD	Adanya Refocusing covid 19 (dana rasionalisasi)	Melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dan mencapai standarisasi yang disyaratkan	Meningkatkan anggaran untuk melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dalam rangka mencapai standarisasi yang disyaratkan
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja	1) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang anggarannya di rasionalisasi; 2) Adanya pengadaan barang dan jasa yang belum terbayarkan	1) Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya; 2) Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran	-
8	Biro Kerjasama				

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
9	Biro Humas dan Protokol	-	1) Perjalanan Dinas dihentikan Sementara; 2) Belanja Modal ditiadakan karena ada rasionalisasi Anggaran; 3) Belanja Barang /Jasa dan Honor dikurangi; 4) Terjadinya Wabah Corona Covid 19,	-	-
10	Sekretariat DPRD	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra dan renja	'1) Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas; 2) Refocusing anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal.	Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD	Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD
11	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-
12	Inspektorat	1. Pengembangan SDM 2. Profesionalisme SDM 3. Ketersediaan Anggaran 4. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD 3. Infrastruktur yang belum memadai	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah	Tingkat koordinasi yang belum optimal	Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders	Evaluasi kinerja dalam periode bulanan
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Komitmen Bappenda; 2. memiliki program kerja; 3. Tersedianya Personil; 4. Tersedianya Dana; 5. Adanya	1. Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaiannya; 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang	Efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang	Optimal dalam perencanaan, maksimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
		UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD.	ditetapkan.	direncanakan	dapat ditekan seminim mungkin
16	Badan Kepegawaian Daerah	Program dan Kegiatan dapat Dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan	Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut	Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan	Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Merencanakan ulang kegiatan- kegiatan yang masih tertunda sesuai dengan anggaran yang tersedia.	Adanya revisi dan reconfusing anggaran yang disebabkan adanya covid 19,sehingga semua kegiatan diklat ditunda.	Melakukan rencana ulang kegiatan setelah anggaran dilakukan revisi dan reconfusing akibat covid 19	Meneliti kembali anggaran yang disusun untuk meminimalisir kesalahan, Menyusun target yang mampu dicapai oleh OPD per triwulannya.
E	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB				
1	Kota Mataram	TIDAK MELAPORKAN			
2	Kota Bima	TIDAK MELAPORKAN			
3	Kabupaten Lombok Barat	MELAPORKAN			
4	Kabupaten Lombok Utara	TIDAK MELAPORKAN			
5	Kabupaten Lombok Tengah	TIDAK MELAPORKAN			
6	Kabupaten Lombok Timur	TIDAK MELAPORKAN			
7	Kabupaten Sumbawa Barat	TIDAK MELAPORKAN			
8	Kabupaten Sumbawa	TIDAK MELAPORKAN			
9	Kabupaten Dompu	TIDAK MELAPORKAN			
10	Kabupaten Bima	TIDAK MELAPORKAN			

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020 sudah mencapai 47,39 persen dengan serapan anggaran mencapai 33,39 persen, masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini masih cukup baik karena masih dalam triwulan II. Adapun kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 90 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 3 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 12 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator atau 13,33 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Balita Stunting dan Gini Ratio. Sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 10 indikator tercapai atau 11,11 persen, 12 indikator atau 13,33 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 68 indikator atau 75,56 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.
2. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada Triwulan II sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2020. Selain itu, adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau refocusing anggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Transfer sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.07/2020 serta surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019).
3. Adapun faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program sampai Triwulan II Tahun 2020 antara lain :
 - a. Faktor Pendorong:
 - 1) Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal OPD terus dibangun;
 - 2) Pemahaman akan Tupoksi, Inovasi, Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama;

- 3) Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
- 4) Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra dan renja;
- 5) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Proses rasionalisasi anggaran Tahun 2020 akibat covid-19 menyebabkan beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian;
- 2) Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan;
- 3) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
- 4) Tingkat koordinasi yang belum optimal;
- 5) Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaiannya;
- 6) Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan;
2. Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders;
3. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Saat ini perangkat daerah tidak melakukan evaluasi triwulan pelaksanaan Renja, sehingga pengolahan data dan analisis triwulanan RKPD dibebankan sepenuhnya di Bappeda, Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sehingga Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja Perangkat Daerah untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPD;
5. Sistem e-monev saat ini belum mengadopsi matriks-matriks evaluasi sesuai permendagri 86 tahun 2017 baik untuk evaluasi RKPD maupun evaluasi dokumen perencanaan lainnya, Diharapkan e-monev perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,
6. Komitmen dan kerjasama serta koordinasi yang tinggi diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan;
7. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
8. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pencapaian program/kegiatan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020 (TRIWULAN II)

No	Ko de	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR		10.347.127.385.417				1.314.213.890.595		135.417.314.794				342.557.122.388				1.694.533.430.555				
1.1		PENDIDIKAN		2.498.448.803.477				508.454.880.172		15.015.716.710				124.206.885.104				542.152.682.147				
1.1.1		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		2.498.448.803.477				508.454.880.172		15.015.716.710				124.206.885.104				542.152.682.147				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	39.676.579.979	100	3.894.298.412	100	70.653.892.888	25	530.691.088	25	1.237.385.382	50,00	1.768.076.470	50,00	2,50	50,00	5.662.374.882	50,00	14,27	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	10.875.362.023	100	975.419.195	100	1.936.431.600	25	46.106.466	25	290.350.706	50,00	336.457.172	50,00	17,38	50,00	1.311.876.367	50,00	12,06	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	39.313.309	0	-	100	7.000.000					-	-	0,00	0,00	0,00	-	-		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa. Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	7.424.438.060	100	1.086.495.300	100	1.321.971.300	25	831.928.300	25	921.133.300	50,00	1.753.061.600	50,00	132,61	50,00	2.839.556.900	50,00	38,25	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan (Dokumen)	35	3.407.782.661	7	365.082.000	7	606.778.700	2	40.800.000	0	207.563.000	2,00	248.363.000	28,57	40,93	2,00	613.445.000	5,71	18,00	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	1.527.190.361	1	239.100.513	12	271.926.550	1	10.300.000	0	20.600.000	1,00	30.900.000	8,33	11,36	1,00	270.000.513	20,00	17,68	
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)			360.230.623.326	100	61.261.669.422	100	64.141.493.480	25	2.635.000		7.801.550	25,00	10.436.550	25,00		25,00	61.272.105.972		17,01	
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	100				98,13						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	95,28				90,50						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) (%)	98,02				94,57						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), (%)	0,24				0,35						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persentase Akreditasi SMA minimal B, (%)	77,5				75,20						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,00				1,04						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			464.244.314.926	100	76.149.991.354	100	82.661.833.200	25	7.164.350		21.568.150	25,00	28.732.500	25,00	0,03	25,00	76.178.723.854		16,41	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah		
					6		7		I		II			12		13=12/7x100		14=6+12			15=14/5x100	
				1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	100				98,13					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	95,28				90,50					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) (%)	98,02				94,57					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), (%)	0,57				0,73					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Persentase Akreditasi SMK minimal B, (%)	75				63,12					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,00				1,04					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi, (%)	6				2,05					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Rasio Siswa SMK terhadap SMA (%)	47				40,50					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
		Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)			67.820.425.260	100	8.268.477.914	100	12.075.884.400			-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8.268.477.914		12,19	
			Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	70,6				68,44					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/ Vokasi (Orang)	225				45					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
		Program Pembinaan Ketenagaan			25.293.133.449	103	3.658.008.409	100	4.503.613.100	0	0		37.155.000	0,00	37.155.000	0,00	0,83	0,00	3.695.163.409		14,61	
			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah, (.....)	18				18					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, (%)	10				16					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV, (%)	100				99,99					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV, (%)	100				99,49					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Kepala Sekolah bersertifikat (%)	100				50					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Pengawas Sekolah bersertifikat (%)	70				35					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	1500				200					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			336.325.119.513	100	60.285.357.247	100	59.884.957.201	25	13.460.038.000		40.328.348.000	25,00	53.788.386.000	25,00	89,82	25,00	114.073.743.247		33,92	
			Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	-			100					0,00	-	0,00		0,00		-	-		
			Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100				99,98					0,00	-	0,00		0,00		-	-		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
										8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	104				108						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	106				110,1						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	83,22				78,22						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99,80				99,72						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	98,94				98,54						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka DO SD/MI (%)	0,04				0,08						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka DO SMP / MTs (%)	0,11				0,15						0,00	-	0,00		0,00	-	-		
		Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan (Dokumen)	5	3.917.175.878	1	500.271.000	100	697.479.600		0		234.386.000	0,00	234.386.000	0,00	33,60	0,00	734.657.000	-	18,75	
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan			30.663.314.371	100	894.804.200	100	5.459.810.053	25	86.053.506		761.917.406	25,00	847.970.912	25,00	15,53	25,00	1.742.775.112		5,68	
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB (%)		1.140.513.228.355	100	199.276.450.397	100	203.076.077.000		0		64.863.840.000	0,00	64.863.840.000	0,00	31,94	0,00	264.140.290.397		23,16	
		Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (%)	97	6.490.802.006	100	1.090.371.680	86,6	1.155.731.100		0		259.119.900	0,00	259.119.900	0,00	22,42	0,00	1.349.491.580	-	20,79	
Rata-rata capaian kinerja (%)														31,88	33,25			35,14	18,77			
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2		KESEHATAN		2.977.049.386.159			489.680.393.135		103.764.414.176		78.917.861.458		182.682.275.633		683.384.864.480							
1.2.1		Dinas Kesehatan		440.852.891.242			66.196.219.673		16.148.575.353		1.665.190.772		17.813.766.125		41.436.669.904	38,90	36,59					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	30.594.837.031	100,00	1.951.073.369,00	100	2.068.678.443	25	369.109.083	25	561.231.214	50,00	930.340.297	50,00	44,97	50,00	2.881.413.666	50,00	9,42	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	36.415.637.580	100,00	3.423.370.516,00	100	286.962.398	25	37.540.370	25	114.259.943	50,00	151.800.313	50,00	52,90	50,00	3.575.170.829	50,00	9,82	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	2.373.119.827	100,00	148.710.000,00	100	14.200.000	25	1.900.000	25	800.000	50,00	2.700.000	50,00	19,01	50,00	151.410.000	50,00	6,38	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	A	1.108.788.753	100,00	102.100.500,00	B	72.100.000	-	5.250.000		5.850.000	-	11.100.000	0	15,40	0,00	113.200.500	-	10,21	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	426.175.928	1,00	26.410.500,00	1	31.200.000	1	5.200.000		7.800.000	1,00	13.000.000	100,00	41,67	1,00	39.410.500	20,00	9,25	
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	83	4.540.778.864	64,00	170.460.400,00	75	34.294.070.800	64	15.380.482.000			63,65	15.380.482.000	84,87	44,85	63,65	15.550.942.400	76,69	342,47	
		Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	85	11.427.839.819	89,00	1.811.651.400,00	76	1.206.462.682	-	34.570.000		75.010.000	-	109.580.000	0,00	9,08	0,00	1.921.231.400	-	16,81	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	99	1.967.123.482	95,00	587.580.500,00	97	3.046.616.010	24	63.600.000	32,95	64.451.000	57,10	128.051.000	58,87	4,20	57,10	715.631.500	57,68	36,38	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	28,49	49.872.434.836	25,50	6.959.483.337,00	31,49	13.037.104.391	26	9.400.000	26	203.530.000	26,41	212.930.000	116,13	1,63	26,41	7.172.413.337	107,30	14,38	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100	8.054.479.892	100,00	1.024.119.150,00	100	1.635.093.000	100	67.340.000		299.834.000	100,00	367.174.000	100,00	22,46	100,00	1.391.293.150	100,00	17,27	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	84	896.905.068	75,64	155.350.000,00	78	584.983.399	-	-		31.720.000	-	31.720.000	0,00	5,42	0,00	187.070.000	-	20,86	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	72	3.755.909.315	61,00	690.781.500,00	60	1.502.003.200	61	51.220.000		108.925.000	61,30	160.145.000	102,17	10,66	61,30	850.926.500	85,14	22,66	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	98	11.935.771.593	100,00	1.190.014.402,00	95,5	3.906.466.000		4.400.000		24.435.000	-	28.835.000	0,00	0,74	0,00	1.218.849.402	-	10,21	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	22.484.556.530	100,00	494.584.725,00	100	113.860.000		-		4.660.000	-	4.660.000	0,00	4,09	0,00	499.244.725	-	2,22	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	95	29.541.505.727	70,00	3.399.701.850,00	80	458.042.200		12.064.000		59.010.000	-	71.074.000	0,00	15,52	0,00	3.470.775.850	-	11,75	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	70	206.408.192.232	-	-	55	3.027.320.000	0	8.611.400			-	8.611.400	0,00	0,28	0,00	8.611.400	-	0,00	
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	241.777.076	-	-							-	-	0,00		-	-	-		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
										8		9										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100	5.461.982.814	100,00	896.744.148,00	100	748.073.050	100	53.964.900	100	77.364.115	100,00	131.329.015	100,00	17,56	100,00	1.028.073.163	100,00	18,82	
		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	85	5.078.047.577	63,90	590.767.482,00	55	162.984.100	69	43.923.600	69	26.310.500	69,01	70.234.100	125,47	43,09	69,01	661.001.582	81,19	13,02	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan (....)	100	8.267.027.298	-	-							-	-			0,00	-	-	-	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		55,15	20,80			38,90	36,59	
														Predikat kinerja		RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1)beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2)beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke III dan ke IV

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :1) Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2) Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3) percepatan proses APBD Perubahan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
1.2.3		Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			178.320.420.772				31.503.908.608		5.124.909.655		5.588.431.552		10.713.341.207				41.390.813.159			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.317.822.849	100	348.190.822	100	509.021.125,00	25	27.750.000,00	25	151.358.130	50,00	179.108.130	50,00	35,19	50,00	527.298.952	50,00	22,75	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	50.341.950.291	90	8.724.342.000	92	275.000.000,00	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	8.724.342.000	-	17,33	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	62,05	3.263.004.660	37,70	592.063.638	39,86	163.131.396,00	0,00	-	39,86	115.131.396	39,86	115.131.396	100,00	70,58	39,86	707.195.034	64,24	21,67	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat (%)	100	3.260.437.188	13,34	265.476.463	100,0	6.668.314.968,00	20,68	616.160.000,00	12,70	1.459.366.168	33,38	2.075.526.168	33,38	31,13	46,72	2.341.002.631	46,72	71,80	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (status akreditasi)	paripurna	387.516.905	80	40.062.400	80	85.050.000,00	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	40.062.400	-	10,34	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	93	21.302.454.762	78,26087	3.732.222.448	87	4.853.048.464,00	0,00	-	8,75	375.039.951	8,75	375.039.951	10,06	7,73	8,75	4.107.262.399	9,41	19,28	
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)	90	547.234.117	82	121.483.750	84	4.231.843.000,00	0	-	0	29.550.000	-	29.550.000	0,00	0,70	0,00	151.033.750	-	27,60	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD (%)	100	96.900.000.000	17,05	16.853.630.431	36,33	14.718.499.655,11	11,06	4.480.999.655,11	8,54	3.457.985.907,20	19,60	7.938.985.562	53,94	53,94	36,65	24.792.615.993	36,65	25,59	
Rata-rata capaian kinerja (%)																41,23	33,21			34,50	31,45	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :Peningkatan pelayananan yang bermutu baik melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan penjangkauan oleh tim keswamas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Beberapa dokumen kegiatan masih dalam proses pengajuan; 2) Adannya refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang di tunda pelaksanaanya dan mempengaruhi target kinerja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal

1.2.4		Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir				658.030.906.724				72.835.263.124			11.290.397.438			10.451.770.278		21.742.167.716					130.145.217.690																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		75.777.154.380		100		11.498.050.000		100		11.702.493.240		25		2.753.058.520		25		2.791.025.830		50,00		5.544.084.350		50,00		47,38		50,00		17.042.134.350		50,00		22,49	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100		4.164.189.419		100		1.150.820.000						-		-		-		-		-		-		0,00		1.150.820.000				27,64					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100		2.360.680.102		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0,00		-		-		-					
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Dokumen)	25		152.104.204		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0,00		-		-		-					
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5		102.437.525		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0,00		-		-		-					
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	100		776.041.857		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0,00		-		-		-					
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (Status Akreditasi)	100		620.833.485		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0,00		-		-		-					

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16							
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	86	410.276.254.045	82	70.756.089.636	83	36.438.859.000	2	765.518.540	2	622.347.863	3,81	1.387.866.403	4,59	3,81	3,81	72.143.956.039	4,43	17,58	
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)	100	6.301.211.708	100	899.564.000	-	-					-	-		0,00	899.564.000		14,28		
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD (%)	100	157.500.000.000	80,9	24.098.526.338	100	24.693.910.884	31	7.771.820.378	29	7.038.396.585	59,98	14.810.216.963	59,98	59,98	59,98	38.908.743.301	59,98	24,70	
Rata-rata capaian kinerja (%)													38,19	37,05			38,13	21,34				
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

1.3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.484.518.622.912				153.699.378.164		10.462.318.624		6.109.084.580		16.571.403.204	49,54	28,14		191.228.489.072	23,89	15,57	
1.3.1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			3.484.518.622.912				153.699.378.164		10.462.318.624		6.109.084.580		16.571.403.204	49,54	28,14		191.228.489.072	23,89	15,57	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100,00	19.293.515.368	91,20	2.733.548.340	100,00	3.837.206.534,00	25,00	730.964.157	25,00	487.127.442	50,00	1.218.091.599	50,00	31,74	50,00	3.951.639.939	50,00	20,48	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur (%)	100,00	5.052.347.400	81,37	202.056.834	100,00	467.740.068,98	25,00	121.688.489	-	-	25,00	121.688.489	25,00	26,02	25,00	323.745.323	25,00	6,41	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100,00	283.360.000	68,50	38.898.800	100,00	33.822.500,00	25,00	5.708.000	-	-	25,00	5.708.000	25,00	16,88	25,00	44.606.800	25,00	15,74	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program (Dokumen)	195	1.880.590.964	33,78	250.159.648	39,00	406.120.496,00	8,00	112.982.987	-	-	8,00	112.982.987	20,51	27,82	8,00	363.142.635	4,10	19,31	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	30,00	1.207.529.900	6,83	50.408.900	7,00	224.221.600,00	2,00	159.156.800	-	-	2,00	159.156.800	28,57	70,98	2,00	209.565.700	6,67	17,35	
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	90,65	2.093.725.185.512	80,28	64.687.611.973	86,65	80.771.650.438	86,65	75.068.672	-	-	86,65	75.068.672	100,00	0,09	86,65	64.762.680.645	95,59	3,09	
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	90,65	357.328.980.369	83,65	37.150.906.580	86,65	16.590.214.270	86,65	7.176.699.840	-	5.573.419.088	86,65	12.750.118.928	100,00	76,85	86,65	49.901.025.508	95,59	13,97	
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rencana program (Dokumen)	10,00	1.337.129.700	2,00	215.151.700	2,00	390.650.000,00	-	48.435.080	-	-	-	48.435.080	0,00	12,40	0,00	263.586.780	-	19,71	
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat (%)	100,00	1.021.020.000	-	-	-	120.316.050,00	-	36.250.800	-	48.538.050	-	84.788.850	0,00	70,47	0,00	84.788.850	-	8,30	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	60,06	284.006.808.900	55,41	5.152.713.084	57,07	14.243.777.542,00	-	1.686.268.000	-	-	-	1.686.268.000	0,00	11,84	0,00	6.838.981.084	-	2,41	
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung (juta m3)	7,23	195.262.000.000	3,86	799.200.000	4,34	20.039.817.998,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	799.200.000	-	0,41	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum (%)	81,66	257.985.221.200	71,81	8.478.778.596	74,88	2.134.913.999	74,88	52.822.799	-	-	74,88	52.822.799	100,00	2,47	74,88	8.531.601.395	91,70	3,31	
			Cakupan sanitasi (%)	72,32	54.000.000.000	70,81	10.730.318.500	72,00	3.704.407.000	72,00	30.423.500	-	-	72,00	30.423.500	100,00	0,82	72,00	10.760.742.000	99,56	19,93	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir (titik)	328	45.274.970.000	19,97	1.163.149.000	17,00	7.335.299.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.163.149.000	-	2,57	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis (%)	31,98	109.660.030.400	20,26	18.135.529.900	21,85	203.066.500	-	3.066.300	-	-	-	3.066.300	0,00	1,51	0,00	18.138.596.200	-	16,54	
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat (%)	50,00	1.994.738.200	7,35	300.999.700	10,00	131.882.345,00	-	45.357.900	-	-	-	45.357.900	0,00	34,39	0,00	346.357.600	-	17,36	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali (%)	100,00	34.458.843.000	49,04	22.425.458.300	100,00	1.294.769.402	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	22.425.458.300	-	65,08	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun (%)	72,73	6.849.883.700	5,10	210.996.900	17,18	360.250.600	-	11.925.600	-	-	-	11.925.600	0,00	3,31	0,00	222.922.500	-	3,25	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan (%)	90,31	2.422.525.600	87,52	246.611.450	87,79	78.531.700,00	-	9.531.700	-	-	-	9.531.700	0,00	12,14	0,00	256.143.150	-	10,57	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang (%)	100,00	7.535.308.100	10,00	843.845.591	20,00	602.771.500,00	-	28.468.000	-	-	-	28.468.000	0,00	4,72	0,00	872.313.591	-	11,58	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan (%)	25,00	754.867.600	2,10	101.066.350	5,00	32.730.700,00	1,00	31.734.700	-	-	1,00	31.734.700	20,00	96,96	3,10	132.801.050	12,40	17,59	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor (%)	25,00	505.283.100	2,00	83.461.502	5,00	16.830.500	1,00	16.200.000	-	-	1,00	16.200.000	20,00	96,25	3,00	99.661.502	12,00	19,72	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah (%)	25,00	638.639.900	2,30	199.065.500	5,00	170.663.600,00	-	14.752.300	-	-	-	14.752.300	0,00	8,64	2,30	213.817.800	9,20	33,48	
		Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji (jenis)	110,00	2.039.844.000	45,10	457.148.720	110,00	507.723.821,00	6,00	64.813.000	-	-	6,00	64.813.000	5,45	12,77	51,10	521.961.720	46,45	25,59	
Rata-rata capaian kinerja (%)																49,54	28,14			23,89	15,57	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pembinaan, Motivasi Etos Kerja dan Pengarahan dari Eselon II

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD

1.4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.062.395.565.747				70.679.125.624		509.650.476		1.791.426.016		2.301.076.492	39,28	37,76		200.667.198.339	40,78	17,77	
1.4.1		Dinas Perumahan dan Permukiman			1.062.395.565.747				70.679.125.624		509.650.476		1.791.426.016		2.301.076.492	39,28	37,76		200.667.198.339	40,78	17,77	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.265.735.485	100	1.278.787.645	100	1.075.158.446	25,00	212.379.133	25,00	203.804.516	50,00	416.183.649	50,00	38,71	50,00	1.694.971.294	50,00	20,51	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.838.538.314	100	635.151.853	100	136.532.330	10,20	36.219.055	5,40	12.706.000	15,60	48.925.055	15,60	35,83	15,60	684.076.908	15,60	14,14	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	345.350.572	100	52.442.000	100	3.802.200	23,67	900.000	31,33	2.902.200	55,00	3.802.200	55,00	100,00	55,00	56.244.200	55,00	16,29	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	31	2.168.989.621	100	298.912.300	10	239.122.810	3,00	48.068.440	2,00	82.801.600	5,00	130.870.040	50,00	54,73	5,00	429.782.340	16,13	19,81	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	183.322.454	100	32.641.800	1	19.800.000	1,00	-	0,00	8.250.000	1,00	8.250.000	100,00	41,67	1,00	40.891.800	20,00	22,31	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani (%)	93,82	464.841.814.438	92	15.175.939.549	92,74	12.808.797.338	0,00	121.945.348	0,00	727.691.900	-	849.637.248		6,63	92,02	16.025.576.797	98,08	3,45	
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (%)	100	6.483.672.818	59	863.109.500	100	267.859.500	1,41	3.778.500	0,00	58.120.000	1,41	61.898.500	1,41	23,11	60,41	925.008.000	60,41	14,27	
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata (%)	25,90	575.268.142.046	2,7	180.029.137.200	5,18	56.128.053.000	0,15	86.360.000	0,00	695.149.800	0,15	781.509.800	2,97	1,39	2,85	180.810.647.000	11,02	31,43	
Rata-rata capaian kinerja (%)																39,28	37,76			40,78	17,77	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

1.5		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			125.957.268.121				29.432.939.500		2.593.142.273		414.376.438		5.232.693.985				48.227.489.544			
1.5.1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			63.560.022.221				11.897.192.000		1.235.413.789		414.376.438		1.649.790.227	60,38	26,15		12.847.761.419	33,45	21,10	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran (Tahun)	5	5.843.883.667	1,00	1.046.868.097	1	1.074.682.000	0,25	195.342.594	0,25	138.494.938	0,50	333.837.532	50,00	31,06	0,50	1.380.705.629	10,00	23,63	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan (Tahun)	5	2.380.185.916	1,00	399.704.633	1	459.448.000	0,25	120.639.250	0,25	17.121.000	0,50	137.760.250	50,00	29,98	0,50	537.464.883	10,00	22,58	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat (Orang)	65	87.579.315	65,00	12.800.000	65	16.416.000	6	2.750.000	65	1.100.000	65,00	3.850.000	100,00	23,45	65,00	16.650.000	100,00	19,01	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen Perenc & Pelaporan (Dokumen)	55	1.365.715.934	11,00	243.018.300	11	230.340.000	6	47.029.200	1	19.885.000	7,00	66.914.200	63,64	29,05	7,00	309.932.500	12,73	22,69	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset (Dokumen)	10	110.638.494	2,00	19.700.000	2	20.772.000	1	4.800.000	-	4.800.000	1,00	9.600.000	50,00	46,22	1,00	29.300.000	10,00	26,48	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya (%)	100	2.925.872.260	20,00	374.835.586	20	549.200.000	-	3.320.000	5	15.980.000	5,00	19.300.000	25,00	3,51	25,00	394.135.586	25,00	13,47	
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial (Kasus)	15	32.601.963.427	7,00	5.859.643.308	21	6.120.999.000	-	315.176.609	1	170.560.000	1,00	485.736.609	4,76	7,94	8,00	6.345.379.917	53,33	19,46	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba) (Desa)	50	11.232.374.046	10,00	2.009.547.897	10	2.108.872.000	10	235.320.339	10	12.900.000	10,00	248.220.339	100,00	11,77	20,00	2.257.768.236	40,00	20,10	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah (%)	100	7.011.809.161	20,00	1.231.853.371	20	1.316.463.000	20	311.035.797	20	33.535.500	20,00	344.571.297	100,00	26,17	40,00	1.576.424.668	40,00	22,48	
Rata-rata capaian kinerja (%)																60,38	26,15			33,45	21,10	
Predikat kinerja																RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Sumber daya aparatur yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik ; 4) Pengawasan yang efektif dan transparan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Masih Kurangnya anggaran Oprasional
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				5	6	7	8	9	12	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
1.5.2		Satuan Polisi Pamong Praja			23.728.471.900				4.659.464.500		798.916.534				1.814.090.415				5.547.168.578			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)	100	4.284.897.300	100	670.753.507	100	687.900.304	25	107.813.624	25	136.104.884	50,00	243.918.508	50,00	35,46	50,00	914.672.015	50,00	21,35	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur (%)	100	5.866.545.400	100	1.039.254.059	100	378.826.600	21	62.608.700	25	64.223.797	46,00	126.832.497	46,00	33,48	46,00	1.166.086.556	46,00	19,88	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	592.242.000	100	109.075.000	100	99.950.000	25	51.500.000	-	-	25,00	51.500.000	25,00	51,53	25,00	160.575.000	25,00	27,11	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program (%)	100	1.423.906.100	7	249.266.100	100	209.061.450	28	44.153.600	2	37.405.200	29,50	81.558.800	29,50	39,01	29,50	330.824.900	29,50	23,23	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (%)	100	104.227.400	100	17.158.400	2	19.568.646	-	3.100.000	2	4.500.000	2,00	7.600.000	100,00	38,84	2,00	24.758.400	2,00	23,75	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS) (%)	100	2.452.110.600	100	395.848.500	100	398.991.562	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	395.848.500	-	16,14	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub) (%)	100	6.687.147.700	100	1.026.132.570	100	2.667.195.938	-	508.773.610	100	760.880.000	100,00	1.269.653.610	100,00	47,60	100,00	2.295.786.180	100,00	34,33	
		Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (%)	100	2.317.395.400	100	225.590.027	100	197.970.000	-	20.967.000	91	12.060.000	91,18	33.027.000	91,18	16,68	91,18	258.617.027	91,18	11,16	
Rata-rata capaian kinerja (%)														55,21	32,82				42,96	22,12		
Predikat kinerja														RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Pengembangan SDM; 2) Ketersediaan Anggaran; 3) Ketetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Keterbatasan Anggaran; 2) Kurangnya Jumlah SDM; 3) Sarpras belum memadai

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Percepatan Pelaksanan Kegiatan pembinaan dan penguwasan; 2) Mendorong pengembangan, pengningkatan dan profesionalisme SDM

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : 1) Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM; 2) Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan

1.5.3		Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB			38.668.774.000				12.876.283.000		558.811.950				1.768.813.343	50,00	31,07		29.832.559.547	21,88	146,67	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.461.752.000	100,00	1.583.508.817	100	1.523.353.600	25	204.624.882	25	447.111.288	50	651.736.170	50,00	42,78	25,00	2.235.244.987	25,00	26,42	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	6.922.899.000	100,00	1.223.897.990	100	758.863.100	25	112.807.075	25	309.418.900	50	422.225.975	50,00	55,64	25,00	1.646.123.965	25,00	23,78	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	101.091.000	100,00	18.000.000	100	45.084.700	25	1.600.000	25	2.700.000	50	4.300.000	50,00	9,54	25,00	22.300.000	25,00	22,06	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	950.258.000	100,00	141.350.000	100	145.441.100	25	47.872.300	25	24.600.000	50	72.472.300	50,00	49,83	25,00	213.822.300	25,00	22,50	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasita Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	140.404.000	100,00	19.875.000	100	23.540.500	25	4.040.500	25	4.175.000	50	8.215.500	50,00	34,90	25,00	28.090.500	25,00	20,01	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana (%)	50	20.969.133.000	50,00	15.778.678.839	50,00	2.255.000.000	12,5	156.405.100	12,5	382.601.600	25	539.006.700	50,00	23,90	12,50	16.317.685.539	25,00	77,82	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				5	6	6	7	8	9	12	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Pesentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) (%)	100	1.123.237.000	100,00	9.298.435.558	100	8.125.000.000	25	31.462.093	25	39.394.605	50	70.856.698	50,00	0,87	25,00	9.369.292.256	25,00	834,13	
			Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi (%)	100	-	-	-							0,00	-		0,00	-	-			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																50,00	31,07			21,88	146,67	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

1.6		SOSIAL			198.757.739.000				62.267.174.000		3.072.072.535		8.490.715.435		11.562.787.970				28.872.706.973			
1.6.1		Dinas Sosial			198.757.739.000				62.267.174.000		3.072.072.535		8.490.715.435		11.562.787.970				28.872.706.973			
		Program Pelayanan Administ	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran (%)	100	26.933.417.395	100,00	956.087.803	100	4.731.946.795	25	741.853.403	25	802.077.505	50	1.543.930.908	50,00	32,63	50,00	2.500.018.711	50,00	9,28	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	22.802.273.203	100,00	278.885.152	100	19.439.792.720	25	136.533.082	25	1.399.751.932	50	1.536.285.014	50,00	7,90	50,00	1.815.170.166	50,00	7,96	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur (%)	100	1.000.895.315	100,00	172.405.000	100	197.975.000	25	750.000	25	750.000	50	1.500.000	50,00	0,76	50,00	173.905.000	50,00	17,37	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD (%)	100	2.041.168.262	100,00	245.466.000	100	922.068.803	25	155.541.000	25	63.085.000	50	218.626.000	50,00	23,71	50,00	464.092.000	50,00	22,74	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD (%)	100	800.834.553	100,00	21.015.000	100	129.449.000	25	13.774.000	25	21.075.000	50	34.849.000	50,00	26,92	50,00	55.864.000	50,00	6,98	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	11,62	47.583.757.149	1,90	10.707.623.821	0,73	15.461.425.000	0,00	16.403.298	0,08	2.222.794.448	0,08	2.239.197.746	11,40	14,48	0,08	12.946.821.567	0,72	27,21	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (%)	17,59	83.541.121.473	2,18	1.354.924.827	2,69	15.125.276.682	1,08	1.916.242.056	1,08	1.783.052.201	2,16	3.699.294.257	80,25	24,46	2,16	5.054.219.084	12,28	6,05	
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina (%)	2,5	147.693.000	0,58	64.004.010	0,00	-	-	-	-	-	-	-			0,00	64.004.010	-	43,34	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	7.689.747.721	100,00	2.772.740.850	100	4.302.755.000	-	-	-	2.074.000.000	-	2.074.000.000	0,00	48,20	100,00	4.846.740.850	100,00	63,03	
		Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	59,5	6.216.830.930	55,50	736.766.540	59,50	1.956.485.000	59,50	90.975.696	59,50	124.129.349	59,50	215.105.045	100,00	10,99	59,50	951.871.585	100,00	15,31	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	4	963.132.046	-	-							-	-		0,00	-	-	-	16	
Rata-rata capaian kinerja (%)																49,07	21,12			42,09	19,93	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal SKPD terus dibangun
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Terus meningkatkan koordinasi,konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran

2.		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			826.423.120.642					98.717.795.087			9.076.419.936			12.089.926.287			21.196.746.223				109.536.827.473					
2.1		TENAGA KERJA			45.185.309.674					8.649.555.083			1.095.347.065			1.170.032.781			2.265.379.846				6.208.263.170					
2.1.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			45.185.309.674					8.649.555.083			1.095.347.065			1.170.032.781			2.265.379.846				6.208.263.170					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.786.072.028	100,00	1.374.444.474	100	2.623.991.668	20,00	476.016.883	30,00	478.452.031	50,00	954.468.914	50,00	36,37	50,00	2.328.913.388	50,00	14,75							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	4.642.108.990	100,00	348.901.334	100	1.274.270.758	20,00	138.533.251	30,00	212.969.750	50,00	351.503.001	50,00	27,58	50,00	700.404.335	50,00	15,09							
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	883.827.172	100,00	48.240.525	100	154.058.055	20,00	23.300.000	30,00	30.550.000	50,00	53.850.000	50,00	34,95	50,00	102.090.525	50,00	11,55							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.212.938.540	100,00	313.966.410	100	244.273.362	20,00	56.455.800	30,00	37.640.000	50,00	94.095.800	50,00	38,52	50,00	408.062.210	50,00	18,44							
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	476.956.368	100,00	20.270.400	100	66.582.746	20,00	10.691.000	30,00	10.820.000	50,00	21.511.000	50,00	32,31	50,00	41.781.400	50,00	8,76							
		Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan (%)	100	3.565.972.233	100,00	146.652.200	100	351.098.410	20,00	71.901.000	30,00	91.418.000	50,00	163.319.000	50,00	46,52	50,00	309.971.200	50,00	8,69							
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	89	4.872.042.243	85,00	188.352.000	86	1.409.080.889	20,00	48.777.015	30,00	33.965.500	50,00	82.742.515	58,14	5,87	50,00	271.094.515	56,18	5,56							
		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	94	8.929.110.600	89,00	1.204.469.461	91	1.566.705.967	20,00	180.453.116	30,00	264.297.500	50,00	444.750.616	54,95	28,39	50,00	1.649.220.077	53,19	18,47							
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja (%)	74	1.433.176.093	70,00	147.016.600	72	438.899.150	20,00	6.520.000	30,00	5.630.000	50,00	12.150.000	69,44	2,77	50,00	159.166.600	67,57	11,11							
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	100	2.383.105.407	95,00	150.569.920	100	520.594.078	20,00	82.699.000	30,00	4.290.000	50,00	86.989.000	50,00	16,71	50,00	237.558.920	50,00	9,97							
Rata-rata capaian kinerja (%)																53,25	27,00			52,69	12,24							
Predikat kinerja																RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Masih Kurangnya anggaran Oprasional
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Sumber daya aparatur yang memadai; 2. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3. Koordinasi yang baik ; 4. Pengawasan yang efektif dan transparan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		49.602.543.512				2.939.628.312		230.811.892		498.541.812		729.353.704	38,25	34,69		5.391.946.747	37,05	16,52		
2.2.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		49.602.543.512				2.939.628.312		230.811.892		498.541.812		729.353.704	38,25	34,69		5.391.946.747	37,05	16,52		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)	100	4.973.291.642	100	826.253.296	100	619.092.120,00	25,00	-	50,00	176.271.012,00	75	176.271.012	75,00	28,47	75,00	1.002.524.308	75,00	20,16	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.163.916.860	100	339.858.535	100	196.755.400,00	33,33	43.375.000	33,33	16.000.000	67	59.375.000	66,67	30,18	66,67	399.233.535	66,67	18,45	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	176.348.273	100	21.300.000	100	16.500.000,00		-			-	-	0,00	0,00	0,00	21.300.000	-	12,08	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan (Dokumen)	30	1.342.212.537	6	115.918.600	6	116.630.000,00	3	-	3,11	53.725.000	3,11	53.725.000	51,76	46,06	3,11	169.643.600	10,35	12,64	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	123.668.438	1	13.620.000	1	12.080.000,00	0,00	-	0,35	4.250.000	0	4.250.000	35,18	35,18	1,35	17.870.000	27,04	14,45	
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja (%)	0,183	5.609.868.813	0	423.127.581	0,110	166.126.830	-	13.476.830	-	4.900.000	-	18.376.830	0,00	11,06	0,08	441.504.411	44,41	7,87	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA (%)	100	11.801.277.287	40	1.374.631.360	60	1.367.546.900	-	102.850.000	0,14	195.758.800	0	298.608.800	0,24	21,84	40,14	1.673.240.160	40,14	14,18	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%)	83,07	5.486.565.427	57	623.128.500	62,41	73.850.000	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00	623.128.500	-	11,36		
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100,00	1.172.659.850	30	48.406.371	62,22	32.800.000,00	-	-		-	-	0,00	0,00	30,43	48.406.371	30,43	4,13		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama (Tahun)	21,00	3.432.248.456	20	455.595.000	20,57	169.547.062,00	8	71.110.062	-	47.637.000	8	118.747.062	38,89	70,04	8,00	574.342.062	38,10	16,73	
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	9,45	932.287.046	1	165.985.000	1,89	25.200.000	-	-		-	-	0,00	0,00	0,69	165.985.000	7,26	17,80		
		Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)	71,42	948.321.260	77	158.288.800	67,87	56.000.000	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00	158.288.800	-	16,69		
		Program KB	Rasio Akseptor KB (%)	87,42	1.685.481.080	-	-							-	-		0,00	-	-	-		
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri (%)	24,83	2.245.339.888	-	-							-	-		0,00	-	-	-		
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA (%)	14,2	635.752.371	4	96.480.000	2,8	47.600.000	-	-		-	-	0,00	0,00	4,42	96.480.000	31,12	15,18		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
										8		9										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) (%)	21,5	5.516.119.898	-	-	19,20	29.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	100,00	1.357.184.388	-	-	1,37	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																38,25	34,69			37,05	16,52	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.3		PANGAN				43.585.379.761					8.183.131.000			252.700.330			223.643.338			476.343.668					6.878.230.221					
2.3.1		Dinas Ketahanan Pangan				43.585.379.761					8.183.131.000			252.700.330			223.643.338			476.343.668					6.878.230.221					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	4.709.195.284	99,52	601.053.569	100	884.149.000	13,7	121.528.930	9,4	82.779.220	23,11	204.308.150	23,11	23,11	23,11	805.361.719	23,11	17,10									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.437.397.105	100,00	691.291.237	100	833.119.000	12,0	17.465.000	8,0	28.096.618	20,01	45.561.618	20,01	5,47	20,01	736.852.855	20,01	16,61									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	120.074.079	78,95	16.880.000	100	22.544.000	5,43	1.225.000	5,43	1.225.000	10,87	2.450.000	10,87	10,87	10,87	19.330.000	10,87	16,10									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD (.....)	65	1.693.645.440	62,15	284.723.600	65	317.981.000	-	35.849.400	74,07	66.942.500	74,07	102.791.900	113,95	32,33	74,07	387.515.500	113,95	22,88									
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	260.655.664	1,00	46.411.500	1	48.938.000	-	2.025.000	-	7.750.000	-	9.775.000	0,00	19,97	1,00	56.186.500	20,00	21,56									
		Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Point)	94,83	31.469.051.574	87,93	4.635.973.247	87,93	5.908.296.000	-	74.607.000	-	36.850.000	-	111.457.000	0,00	1,89	0,00	4.747.430.247	-	15,09									
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan (%)	100,00	895.360.616	73,91	125.553.400	73,9	168.104.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	73,91	125.553.400	73,91	14,02									
Rata-rata capaian kinerja (%)																41,99	15,61				37,41	17,62								
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Adanya dukungan pembiayaan melalui dana APBN dan APBD; 2) Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas kerja
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.4		PERTANAHAN			2.870.978.200				210.978.200													
		Sekretariat Daerah			2.870.978.200				210.978.200													
2.4.1		Biro Pemerintahan			2.870.978.200				210.978.200													
2.5		LINGKUNGAN HIDUP			110.439.909.347				29.235.578.208		1.371.022.555		4.580.508.243		5.951.530.798				23.850.984.564			
2.5.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			110.439.909.347				29.235.578.208		1.371.022.555		4.580.508.243		5.951.530.798				23.850.984.564			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.822.286.331	100,00	1.564.639.735,00	100	6.335.476.000	60,16	667.974.236	10,61	1.151.183.464	70,77	1.819.157.700	70,77	28,71	70,77	3.383.797.435	70,77	21,39	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.888.485.315	100,00	751.275.735,00	100	5.096.143.000	30,52	188.509.689	10,73	409.421.252	41,25	597.930.941	41,25	11,73	41,25	1.349.206.676	41,25	27,60	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	1.859.321.272	100,00	133.327.819,00	100	460.936.000	2,94	5.821.200	3,92	19.106.300	6,86	24.927.500	6,86	5,41	6,86	158.255.319	6,86	8,51	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	A	2.566.926.578	100,00	415.455.600,00	B	1.090.468.000	B	164.634.700	B	133.533.100	B	298.167.800	100,00	27,34	B	713.623.400	80,00	27,80	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	19	831.598.360	14,00	98.630.000,00	19	393.116.000	16	31.203.300	3	56.357.300	19,00	87.560.600	100,00	22,27	19,00	186.190.600	100,00	22,39	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	100	74.266.946.439	0,00	13.883.282.956,00	15	13.943.579.000	-	155.600.500	-	2.556.479.827	0,00	2.712.080.327	0,00	19,45	0,00	16.595.363.283	-	22,35	
			Persentase penanganan sampah (%)	70	-	0,00	-	60		-		-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya (Lokasi)	10	10.204.345.052	2,00	1.052.841.921,00	4	1.915.860.208	-	157.278.930	-	254.427.000	0,00	411.705.930	0,00	21,49	2,00	1.464.547.851	20,00	14,35	
Rata-rata capaian kinerja (%)																39,86	17,05			39,86	18,05	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Terjalinnya koordinasi baik dalam internal maupun dengan instansi/mitra/pihak luar

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -adanya restrukturisasi anggaran akibat kondisi Covid menyebabkan terhambatnya pencairan dana kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1) Meningkatkan koordinasi pemantauan kualitas lingkungan dengan Dinas LH kab/kota, menggccarkan sosialisasi dan pembinaan pengawasan kepada unit usaha agar taat terhadap kewajiban dalam dokumen lingkungan; 2) meningkatkan koordinasi dengan KPH se-NTB, meningkatkan pemahaman regulasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			16.752.734.387				1.059.190.000												
2.8.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			16.752.734.387				1.059.190.000												
2.9		PERHUBUNGAN			143.373.416.600				3.566.263.695				639.953.696		1.017.384.418				9.947.902.488		
2.9.1		Dinas Perhubungan			143.373.416.600				3.566.263.695				639.953.696		1.017.384.418				9.947.902.488		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.145.258.856	100,00	2.103.313.559	100,00	1.238.056.620	15,58	192.862.236	23	280.774.638	38,26	473.636.874	38,26	38,26	38,26	2.576.950.433	38,26	19,60
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.957.906.543	76,32	203.942.657	100,00	135.801.000	5,83	7.915.000	39	52.925.200	44,80	60.840.200	44,80	44,80	44,80	264.782.857	44,80	5,34
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat (%)	74	495.753.100	49,38	21.497.500	28,41	11.440.000	8,39	960.000	9	980.000	16,96	1.940.000	59,69	16,96	16,96	23.437.500	22,96	4,73
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100	881.776.065	100,00	155.093.300	100,00	144.312.375	3,73	5.387.375	41	59.550.000	45,00	64.937.375	45,00	45,00	45,00	220.030.675	45,00	24,95
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan (%)	100	434.819.900	94,23	34.143.000,00	100,00	23.100.000	-	3.350.000	-	4.983.125	0,00	8.333.125	0,00	36,07	0,00	42.476.125	-	9,77
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW (%)	97	5.267.752.425	75,00	925.139.600,00	75,00	88.960.000	-	12.925.500	3	2.821.500	3,17	15.747.000	4,23	17,70	3,17	940.886.600	3,28	17,86
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara (%)	100	7.348.728.276	100	170.204.000	100,00	344.900.000	-	-	-	-	0,00	-		0,00		170.204.000	-	2,32
		Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak (%)	81,63	9.290.974.815	70,2426564	1.627.426.965	79,76	967.857.800	8,43	136.130.211	1	224.999.733	9,71	361.129.944	12,17	37,31	9,71	1.988.556.909	11,89	21,40
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia (%)	100	88.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00		-		
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas (%)	2,68	5.749.854.396	3,13	286.716.100,00	3,08	521.316.000	0,51	-	1	-	1,13	-		1,13		286.716.100	-	4,99
		Program peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas (%)	50	1.183.388.873	20,00	50.089.600	20,00	31.900.000	-	-	-	8.700.000	0,00	8.700.000			20,00	58.789.600	40,00	4,97
		Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang (%)	25	6.617.203.351	(13,00)	3.352.951.789	5,00	58.619.900	14,60	17.900.400	(93)	4.219.500	14,60	22.119.900	292,00	37,73	14,60	3.375.071.689	58,40	51,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																62,02	34,23			24,05	15,18
Predikat kinerja																RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Belum optimalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Meningkatkan kinerja , SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.

2.10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			59.617.647.229				10.046.519.793				1.143.900.756		1.221.908.087		2.365.808.843			11.883.289.706		
2.10.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			59.617.647.229				10.046.519.793				1.143.900.756		1.221.908.087		2.365.808.843			11.883.289.706		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	
					6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																		16	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.747.736.321	100,00	1.391.622.260	100,00	1.670.166.042	25	310.456.767	25	221.865.346	50,00	532.322.113	50,00	31,87	50,00	1.923.944.373	50,00	21,99	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.776.650.000	100,00	918.922.347	100,00	342.860.000	25	93.490.906	25	29.910.713	50,00	123.401.619	50,00	35,99	50,00	1.042.323.966	50,00	21,82	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	927.465.000	100,00	46.660.000	100,00	113.250.100	25	4.750.000	25	950.000	50,00	5.700.000	50,00	5,03	50,00	52.360.000	50,00	5,65	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	1.049.472.000	70,00	215.506.500	74,00	188.872.000	0	25.577.000	0	55.975.000	0,00	81.552.000	0,00	43,18	0,00	297.058.500	-	28,31	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Manajemen Aset (%)	100	250.647.300	100,00	15.419.800	100,00	37.537.300	0	-	0	4.950.000	0,00	4.950.000	0,00	13,19	0,00	20.369.800	-	8,13	
		Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	4,0	12.854.808.000	3,30	2.122.960.106	3,50	2.391.300.658,50	0	101.055.815	0	313.284.000	0,00	414.339.815	0,00	17,33	0,00	2.537.299.921	-	19,74	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi (%)	90	13.644.917.000	100,00	1.793.502.273	75,00	1.597.198.592,50	100	200.836.350	100	198.213.800	100,00	399.050.150	133,33	24,98	100,00	2.192.552.423	111,11	16,07	
		Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika (%)	70	2.321.610.400	64,35	299.758.200	55,00	109.417.500	0	-	0	8.100.000	0,00	8.100.000	0,00	7,40	64,35	307.858.200	91,93	13,26	
		Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif (%)	8	14.931.567.208	7,00	2.614.667.927	5,00	2.381.761.600	0	229.222.618	0	262.659.228	0,00	491.881.846	0,00	20,65	7,00	3.106.549.773	87,50	20,81	
		Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	89,04	112.774.000	92,56	98.461.450	80,00	1.214.156.000	10	178.511.300	10	126.000.000	20,00	304.511.300	25,00	25,08	112,56	402.972.750	126,42	357,33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																30,83	22,47			56,70	51,31	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			52.157.002.085				5.139.611.368		723.670.222		722.212.680		1.445.882.902				5.368.633.769			
2.11.1		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			52.157.002.085				5.139.611.368		723.670.222		722.212.680		1.445.882.902				5.368.633.769			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	7.960.360.741	115,38	1.026.707.264,00	100	1.235.315.332	20,73	256.085.158	25,00	282.224.690	45,73	538.309.848	45,73	43,58	20,73	1.565.017.112	20,73	19,66	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.870.285.763	130,45	375.821.253,00	70	255.120.136	22,48	57.359.536	25,00	110.445.000	47,48	167.804.536	67,83	65,77	22,48	543.625.789	22,48	18,94	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	83.119.568	58,11	8.000.000,00	48	12.000.000	15,00	1.800.000	25,00	4.327.500	40,00	6.127.500	83,33	51,06	98,11	14.127.500	98,11	17,00	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	95	1.716.671.806	20,00	301.163.400,00	95	427.771.300	15,09	64.567.000		94.850.000	15,09	159.417.000	15,89	37,27	35,09	460.580.400	36,94	26,83	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	145.529.446	100,00	14.762.500,00	100	25.998.000	23,08	6.000.000		5.875.000	23,08	11.875.000	23,08	45,68	123,08	26.637.500	123,08	18,30	
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha (%)	60	871.351.417	30,20	151.486.700,00	16,67	7.500.000	-	-		-	0,00	-			30,20	151.486.700	50,33	17,39	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah		
									I		II												
					1	2	3	4	5		6		7		8		9		12			13=12/7x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM (%)	100	28.457.725.103	14,92	581.655.950,00	17,69	2.815.909.500	10,70	301.428.528		176.363.390	10,70	477.791.918	60,52	16,97	25,63	1.059.447.868	25,63	3,72		
		Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah (%)	0,33	2.017.525.329	1,67	163.484.000,00	1,67	41.000.000	-	-		-	0,00	-			0,00	163.484.000	-	8,10		
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	81,33	8.034.432.912	59,61	1.299.669.800,00	65,14	318.997.100	11,42	36.430.000		48.127.100	11,42	84.557.100	17,53	26,51	71,03	1.384.226.900	87,34	17,23		
Rata-rata capaian kinerja (%)																44,85	40,98				51,63	16,35	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pemahaman akan Tupoksi,Inovasi,Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Menunggu DPA Perubahan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.12	PENANAMAN MODAL				19.371.787.535				1.241.112.229		379.999.355		325.965.712		705.965.067				3.263.863.864			
2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				19.371.787.535				1.241.112.229		379.999.355		325.965.712		705.965.067				3.263.863.864			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.652.272.150	100	725.155.411	100	498.288.606	25	108.464.720	25	134.074.014	50,00	242.538.734	50,00	48,67	50,00		967.694.145	50,00	20,80	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	559.793.442	100	92.969.470	100	68.909.350	25	10.841.850	25	20.236.498	50,00	31.078.348	50,00	45,10	50,00		124.047.818	50,00	22,16	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	80.873.093	100	3.050.000	100	1.575.500	25	916.312	25	600.000	50,00	1.516.312	50,00	96,24	50,00		4.566.312	50,00	5,65	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	100	1.010.115.312	100	173.270.900	100	140.381.500	25	29.604.250	25	40.175.000	50,00	69.779.250	50,00	49,71	50,00		243.050.150	50,00	24,06	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	108.305.920	100	18.871.300	100	11.720.000	25	2.475.000	25	2.475.000	50,00	4.950.000	50,00	42,24	50,00		23.821.300	50,00	21,99	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi (Perusahaan)	25	7.525.718.692	5	895.569.902	5	202.791.176		119.059.426		55.409.200	0,00	174.468.626	0,00	86,03	5,00		1.070.038.528	20,00	14,22	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	88.410	5.434.708.925	10.023	649.011.814	16.000	317.446.097	2.142	108.637.797	782	72.996.000	2924,00	181.633.797	18,28	57,22	12947,00		830.645.611	14,64	15,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)														44,71	60,74				40,66	17,74		
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian target Triwulan I

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat Wabah COVID 19

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Merubah pemantauan lapangan/perusahaan dengan metode vidio conferences atau teleconferences jika wabah COVID masih berlangsung

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Merevui kembali target yang telah ditetapkan dan memperbaiki strategi pencapaian target indikator kinerja kunci

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
2.13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			97.134.878.352				6.767.230.492		1.637.133.218		451.871.764		2.119.404.982				15.112.530.527			
2.13.1		Dinas Pemuda dan Olahraga			97.134.878.352				6.767.230.492		1.637.133.218		451.871.764		2.119.404.982				15.112.530.527			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.892.729.705	100,00	1.640.844.518	100	1.288.775.268,00	25	249.887.308,00	25	171.200.000,00	50,00	421.087.308	50,00	32,67	50,00	2.061.931.826	50,00	23,19	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1.904.918.273	100,00	345.250.580	100	284.570.361,00	20	31.531.083,00	30	-	50,00	31.531.083	50,00	11,08	50,00	376.781.663	50,00	19,78	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	931.572.392	100,00	132.325.000	100	21.700.000,00	25	1.650.000,00	25	-	50,00	1.650.000	50,00	7,60	50,00	133.975.000	50,00	14,38	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	A	2.173.085.628	66,67	327.716.346	-	215.763.560,00	2	49.728.000,00	1	-	3,00	49.728.000	50,00	23,05	3,00	377.444.346	50,00	17,37	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	151.842.450	2,00	27.491.500	3	31.297.200,00	1	12.253.200,00	-	-	1,00	12.253.200	33,33	39,15	1,00	39.744.700	20,00	26,17	
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan (%)	100	3.291.994.691	60,00	1.134.791.600	70	12.500.000,00	-	10.000.000,00	-	-	0,00	10.000.000	0,00	80,00	0,00	1.144.791.600	-	34,78	
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi (Orang)	43	12.835.029.396	23,00	669.665.000	9	367.537.403,00	-	168.464.403,00	-	-	0,00	168.464.403	0,00	45,84	0,00	838.129.403	-	6,53	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda (%)	68,39	2.732.555.474	68,07	420.466.900	68,07	288.331.200,00	-	239.244.600	-	-	0,00	239.244.600	0,00	82,98	0,00	659.711.500	-	24,14	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi (%)	100	36.739.712.823	100,00	3.471.320.065	100	1.278.337.700	100	154.190.000,00	100	-	100,00	154.190.000	100,00	12,06	100,00	3.625.510.065	100,00	9,87	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar (%)	55	27.481.437.518	35,00	4.823.254.036	35	2.978.417.800	40	720.184.624,00	-	280.671.764,00	40,00	1.031.256.388	114,29	34,62	40,00	5.854.510.424	72,73	21,30	
Rata-rata capaian kinerja (%)																44,76	36,91			39,27	19,75	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ilmu pengetahuan yang terus berkembang, Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota, , jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana & dana yang masih kurang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja

2.14		STATISTIK			9.176.632.000				1.214.156.000		178.511.300		-		178.511.300				1.527.456.674			
2.14.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			9.176.632.000				1.214.156.000		178.511.300		-		178.511.300				1.527.456.674			
		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi (%)	100	9.176.632.000	95,49	1.348.945.374	70,00	1.214.156.000	10,00	178.511.300			10,00	178.511.300	14,29	14,70	10,00	1.527.456.674	10,00	16,65	
Rata-rata capaian kinerja (%)																14,29	14,70			10,00	16,65	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
										8												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

2.17		PERPUSTAKAAN			38.287.771.909				6.279.403.500		698.896.700		1.139.833.400		1.838.730.100				8.030.704.899			
2.17.1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			38.287.771.909				6.279.403.500		698.896.700		1.139.833.400		1.838.730.100				8.030.704.899			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.179.780.122	100	1.459.370.450,00	100	2.322.891.000,00	25,00	242.646.700,00	25,00	541.786.000,00	50,00	784.432.700	50,00	33,77	25,00	2.243.803.150	25,00	24,44	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	21.666.105.918	100	3.713.068.449,00	100,00	1.086.766.000,00	25,00	137.143.000,00	25,00	229.380.400,00	50,00	366.523.400	50,00	33,73	25,00	4.079.591.849	25,00	18,83	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	198.172.775	100	35.086.000,00	100,00	22.274.000,00	25,00	1.800.000,00	25,00	3.600.000,00	50,00	5.400.000	50,00	24,24	25,00	40.486.000	25,00	20,43	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja (Dokumen)	30	1.205.346.059	6	214.610.000,00	6	229.165.000,00	2,00	69.645.000,00		98.695.000,00	2,00	168.340.000	33,33	73,46	8,00	382.950.000	26,67	31,77	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	130.295.539	1	23.200.000,00	1	27.050.000,00	1,00	4.650.000,00	-	9.300.000,00	1,00	13.950.000	100,00	51,57	2,00	37.150.000	40,00	28,51	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Kunjungan)	1.206.000	5.908.071.495	1.064.186	746.639.900,00		2.591.257.500,00	-	243.012.000,00	-	257.072.000,00	0,00	500.084.000	0,00	19,30	1064186	1.246.723.900	88,24	21,10	
Rata-rata capaian kinerja (%)																47,22	39,34			38,32	24,18	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran

2.18	KEARSIPAN				2.453.851.280				3.108.324.000		264.857.000		279.217.000		544.074.000				1.300.948.000			
2.18.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				2.453.851.280				3.108.324.000		264.857.000		279.217.000		544.074.000				1.300.948.000			
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (%)	100	194.931.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo (%)	100	841.287.968		349.797.000,00		2.591.257.500,00	-	243.012.000,00	-	257.072.000,00	0,00	500.084.000	0,00	19,30	0,00	849.881.000	-	101,02	
		Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan (%)	100	432.165.591		349.797.000,00		131.559.000,00	3,75	20.000.000,00	4	20.300.000,00	7,75	40.300.000	0,00	30,63	3,75	390.097.000	3,75	90,27	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi (Orang)	295	776.095.269		20.000.000,00	96,00	316.979.000,00	24,00	-	24	-	48	-	0,00	0,00	48,00	20.000.000	16,27	2,58	
		Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD (OPD)	45	209.371.452		37.280.000,00	117,00	68.528.500,00	29,25	1.845.000,00	29,25	1.845.000,00	29,25	3.690.000	0,00	5,38	29,25	40.970.000	65,00	19,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	11,06			17,00	42,69		
Predikat kinerja															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
												I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran

3.		URUSAN PILIHAN			1.674.226.615.260				247.125.549.489		5.524.869.919		11.061.229.319		16.586.099.238				182.942.113.876			
3.1		KELAUTAN DAN PERIKANAN			124.676.023.199				26.305.639.000		1.714.583.440		2.026.182.515		3.740.765.955				15.697.301.687			
3.1.1		Dinas Kelautan dan Perikanan			124.676.023.199				26.305.639.000		1.714.583.440		2.026.182.515		3.740.765.955				15.697.301.687			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	22.400.215.655	100,00	1.573.771.580,00	100	4.232.376.533	16,48	697.600.849	23,09	977.547.413	39,57	1.675.148.262	39,57	39,58	39,57	3.248.919.842	39,57	14,50	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	25.803.378.845	100,00	1.190.732.014,00	100	1.089.261.184	48,24	525.412.361	10,29	112.090.158	58,53	637.502.519	58,53	58,53	58,53	1.828.234.533	58,53	7,09	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	185.334.172	100,00	34.970.000,00	100	39.000.000	34	13.230.000	35,00	-	68,92	13.230.000	68,92	33,92	68,92	48.200.000	68,92	26,01	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	A	1.376.549.904	-	274.882.383,00	BB	353.273.783	A	39.732.600	A	42.000.000	A	81.732.600	110,00	23,14	A	356.614.983	100,00	25,91	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	605.329.486	1,00	26.725.000,00	1	94.530.000	-	17.486.000	-	26.110.000	0,00	43.596.000	0,00	46,12	0,00	70.321.000	-	11,62	
		Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial (Rasio)	0,101	16.895.456.231	0,09	2.824.754.729,00	26,28	5.052.963.500	1,76	88.713.680	2,11	336.187.200	3,87	424.900.880	14,73	8,41	3,87	3.249.655.609	-	19,23	
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan (%)	5,47	8.424.280.535	0,59	1.492.998.555,00	0,91	5.032.450.000	3,55	52.621.100	-	-	0,59	52.621.100	64,84	1,05	0,59	1.545.619.655	10,78	18,35	
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	1.243.386	16.933.084.684	1.149.500,00	1.429.846.321,00	1.171.670	2.822.378.000	292.918	197.388.500	299.743	150.785.750	592661	348.174.250	50,58	12,34	592661,00	1.778.020.571	47,67	10,50	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	256.572	23.270.109.312	219.349,00	1.793.130.150,00	227.961	5.932.957.200	46.137	60.738.350	48.702	369.961.994	94839,42	430.700.344	41,60	7,26	94839,42	2.223.830.494	36,96	9,56	
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	40,59	8.782.284.376	38,20	1.314.725.000,00	42,40	1.656.448.800	40,36	21.660.000	40,36	11.500.000	40,36	33.160.000	95,19	2,00	40,36	1.347.885.000	99,43	15,35	
Rata-rata capaian kinerja (%)															54,40	23,23				46,19	15,81	
Predikat kinerja															RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : koordinasi dan Kerjasama yang intens dengan penyuluh serta dukungan anggaran dari NGO dalam pelaksanaan program dan kegiatan selain dukungan anggaran dari APBN
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan tahun sebelumnya belum dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir masalah pada pelaksanaan tahun berjalan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : menjadikan hasil evaluasi sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu diawal tahun sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan

3.2		PARIWISATA			170.546.386.000				31.762.567.000		-		-		-				23.158.204.369			
3.2.1		Dinas Pariwisata			170.546.386.000				31.762.567.000		-		-		-				23.158.204.369			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	13.196.657.751	100,00	1.933.580.906	100	2.955.000.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.580.906	-	14,65	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang berkondisi baik (%)	100	2.206.400.000	100,00	263.819.768	100	590.000.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	263.819.768	-	11,96	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten (%)	100	299.000.000	100,00	44.988.800	100	52.000.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	44.988.800	-	15,05	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	100	3.486.050.000	100,00	291.777.575	100	730.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	291.777.575	-	8,37	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	276.325.000	100,00	41.739.562	100	100.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	41.739.562	-	15,11	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan (Orang)	23.100.000	18.917.458.200	3.706.352	2.375.183.648	4.400.000	3.000.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.375.183.648	-	12,56	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa) (%)	15,38	62.299.703.000	20,00	14.895.717.800	28,57	12.335.567.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	14.895.717.800	-	23,91	
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (%)	1	11.806.692.000	15,63	159.475.100	34,38	2.000.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	159.475.100	-	1,35	
		Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap (Hari)	3,35	30.058.100.049	2,05	3.151.921.210	2,95	5.000.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	3.151.921.210	-	10,49	
		Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata (%)	50,00	28.000.000.000	-	-	12,50	5.000.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	0,00			0,00	11,34	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

PERTANIAN				701.352.822.524				78.701.942.282		1.476.762.422		3.712.627.623		5.189.390.046				101.867.921.545			
3.3.1	Dinas Pertanian dan Perkebunan			601.453.894.484				78.687.312.012		1.475.074.691		3.711.113.695		5.186.188.386				89.503.014.398			
	Program Pelayanan Administrasi Perkentoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	47.853.062.000	100,00	814.488.418	100	5.697.179.736	25,00	804.691.751	25,00	2.403.390.425	50,00	3.208.082.176	50,00	56,31	25,00	4.022.570.594	50,00	8,41	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	45.212.760.000	100,00	401.646.431	100	1.340.579.497	25,00	115.279.496	25,00	312.642.946	50,00	427.922.442	50,00	31,92	25,00	829.568.873	50,00	1,83	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	1.425.777.000	100,00	137.290.000	100	169.350.000	25,00	24.940.000	25,00	62.010.000	50,00	86.950.000	50,00	51,34	25,00	224.240.000	50,00	15,73	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD		3.745.966.000	0,00	380.133.820	-	285.719.820	-	74.518.720	-	132.571.550	0,00	207.090.270	0,00	72,48	0,00	587.224.090	-	15,68	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)		1.389.372.000	29,00	104.036.047	20	108.044.000	-	21.790.600	-	42.850.600	0,00	64.641.200	0,00	59,83	29,00	168.677.247	-	12,14	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100	42.047.612.000	115,81	87.180.000	105	6.588.947.635	-	50.360.000	-	55.760.000	0,00	106.120.000	0,00	1,61	115,81	193.300.000	-	0,46	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (%)	5	445.801.197.000	0,00	82.408.041.434		63.546.096.255	-	375.499.055	-	693.893.105	0,00	1.069.392.160	0,00	1,68	0,00	83.477.433.594	-	18,73	
		Produksi Padi (Ton GKG)	46,75	13.964.184.300	2436349,00	-	2.370.406	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		-	-		
		produksi Jagung (Ton PK)			#####	-	#####	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		-			
		Produksi Kedelai (Ton Biji Kering)			80925,00	-	57.225	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		-			
		Produksi Cabe (Ton Buah Segar)			181926,00	-	19.253	-	19.101	-	46.774	-	65874,57	-	342,15	0,00			342,15		
		Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah)			161411,00	-	199.386	-	10.679	-	37.155	-	47833,60	-	23,99	0,00			23,99		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
										8		9										
1	2	3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Produksi Manggis (Ton Buah Segar)			11556,00	-	7.459		5.781	-	6.511	-	12292,20	-	164,80	0,00			164,80		
			Produksi Tembaku			43068,47	-	52.211		-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			-		
			Produksi Kopi (Ton Berasan)			6566,36	-	4.987	-	-	-	580,01	-	580,01	-	11,63	0,00			11,63		
			Produksi Kakao (Ton)			2219,35	-	2.136	-	-	-	715,96	-	715,96	-	33,52	0,00			33,52		
			Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra)			48766,08	-	49.337	-	-	-	21.126,79	-	21126,79	-	42,82	0,00			42,82		
			Produksi Mete (Ton Biji Kering)			10410,72	-	12.990	-	-	-	2.759,26	-	2759,26	-	21,24	0,00			21,24		
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	46,75	13.964.184	26,75	554.182.397	31,75	951.395.069	-	7.995.069	-	7.995.069	0,00	15.990.138	0,00	1,68			-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	34,61			61,90	9,12		
Predikat kinerja															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Terbangunnya Koordinasi pada jajaran Pengelola Keuangan serta instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi

3.3.2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			99.898.928.040			14.630.270		1.687.731		1.513.928		3.201.660				12.364.907.147				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.777.910.909	96	927.227.686	100	1.716.348	16	396.979	10	394.486	26,00	791.465	26,00	46,11	26,00	928.019.151	26,00	7,88	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.388.957.474	97	290.598.074	100	267.626	12	34.362	21	100.432	33,00	134.794	33,00	50,37	33,00	290.732.868	33,00	12,17	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	1.209.490.805	100	58.392.500	100	62.023	25	17.624	25	4.100	50,00	21.724	50,00	35,03	50,00	58.414.224	50,00	4,83	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	85	5.371.983.417	71	865.949.795	100	916.248	20	225.780	29	217.048	49,00	442.828	49,00	48,33	49,00	866.392.623	57,65	16,13	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	633.168.925	98	39.106.000	100	60.960	13	15.025	13	15.335	26,00	30.360	26,00	49,80	26,00	39.136.360	26,00	6,18	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak (%)	5	75.222.257.493	5	9.194.241.232	5	11.240.732	0,35	901.891	0,30	711.727	0,65	1.613.618	13,00	0,00	0,65	9.195.854.850	13,00	12,22	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS (%)	< 1	1.673.445.700	1	704.233.000	1	101.889	0,20	23.570	-	8.640	0,20	32.210	20,00	31,61	0,20	704.265.210	-	42,08	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan (%)	75	548.982.282	75	90.667.900	80	227.305	-	47.000	23	62.160	23,00	109.160	28,75	48,02	23,00	90.777.060	30,67	16,54	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan (Kelompok)	100	1.072.731.035	100	191.289.300	100	37.139	5	25.500	-	-	5,00	25.500	5,00	68,66	5,00	191.314.800	5,00	17,83	
Rata-rata capaian kinerja (%)														27,86	41,99				26,81	15,10	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Pengadaan kegiatan bansos senilai 6M belum terealisasi karena di relokasi dari DPA murni ke DPA perkara 5 yang pelaksanaanya di laksanakan di triwulan III; 2) Kegiatan yang bersumber dari dana DAK senilai 1,1 M belum bisa dilaksanakan karena per tanggal 28 Maret2020 berdasarkan surat kemenkeu dan belum bisa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Kegiatan bansos tidak dilakukan verifikasi dan proses pengadaan tidak dilakukan dengan penyusunan HPS dan percepatan kelompok; 2) Kegiatan DAK sudah berkoordinasi dengan BPKAD terkait pelaksanaan selanjutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

3.4	KEHUTANAN			263.506.449.559			50.515.692.804		1.341.780.406		4.854.398.049		6.196.178.455			11.075.998.343			
3.4.1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			263.506.449.559			50.515.692.804		1.341.780.406		4.854.398.049		6.196.178.455			11.075.998.343			

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	
									I		II											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	17.922.024.449			100	3.364.850.298					0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	22.254.836.683			100	4.178.333.428					0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	595.733.669			100	111.848.671					0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	85	3.241.175.103			85	608.528.855					0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	1.262.232.979	14,00	315.882.000	100	236.983.552					0,00	-			14,00	315.882.000	14,00	25,03	
		Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan (%)	0,0020	93.284.043.683	0,001	1.561.184.031	0,0012	17.514.028.000	-	1.063.875.733	-	4.005.512.967	0,00	5.069.388.700	0,00	28,94	0,00	6.630.572.731	45,01	7,11	
		Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling (%)	40,95	78.500.134.844	35,60	1.656.786.249	31,69	15.780.859.000	-	223.478.973	-	561.338.583	0,00	784.817.556	0,00	4,97	0,00	2.441.603.805	-	3,11	
			Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya (%)	20,08		0,00	-	5,08		-		-		0,00	-	0,00		0,00	-	-		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial (%)	41,56	46.446.268.149	43,62	1.345.967.608	32,30	8.720.261.000	-	54.425.700	-	287.546.499	0,00	341.972.199	0,00	3,92	0,00	1.687.939.807	-	3,63	
			Persentase penurunan luas lahan kritis (%)	0,54		0,53	-	0.53		-		-		0,00	-			0,00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	12,61			9,00	4,62	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd Tahun berikutnya : -

3.5		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			69.711.188.193				12.278.436		737.876		526.333		1.264.208				9.946.171.464			
3.5.1		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			69.711.188.193				12.278.436		737.876		526.333		1.264.208				9.946.171.464			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.051.161.714	100,00	681.810.358	100	882.414,21	25,00	158.061,84	50,00	95.776,88	75,00	253.839	75,00	28,77	75,00	682.064.197	75,00	8,47	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	3.904.240.486	100,00	313.811.218	100	324.819,00	25,00	106.099,57	50,00	20.458,20	75,00	126.558	75,00	38,96	75,00	313.937.776	75,00	8,04	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	800.966.000	17,89	5.809.600	100	18.466,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5.809.600	-	0,73	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	BB	1.037.354.400	-	136.099.200	B	185.857,30	-	54.270,40	-	38.700,00	0,00	92.970	0,00	50,02	0,00	136.192.170	-	13,13	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	BB	142.146.000	1,00	20.919.100	1	22.582,90	-	3.700,00	-	7.647,90	0,00	11.348	0,00	50,25	0,00	20.930.448	40,00	14,72	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices (%)	8	7.180.830.000	2,17	465.881.340	2,17	474.555,09	0,87	48.313,66	0,87	24.488,90	1,74	72.803	80,14	15,34	1,74	465.954.143	21,74	6,49	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	97	18.005.407.959	99,55	2.276.814.400	95,09	3.965.859,00	-	111.672,50	-	26.960,00	0,00	138.633	0,00	3,50	0,00	2.276.953.033	-	12,65	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih (KK)	3.400	14.449.961.200	2.125,00	5.460.593.099	2.040	4.204.350,00	-	140.024,06	-	55.675,00	0,00	195.699	0,00	4,65	2125,00	5.460.788.798	62,50	37,79	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral (%)	100	2.250.832.500	100,00	341.718.431	100	581.266	9,74	56.593	46,52	21.000,00	56,26	77.593	56,26	13,35	56,26	341.796.024	56,26	15,19	
		Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi (Situs)	15	3.778.537.700	4,00	74.054.636	3	264.776,60	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	74.054.636	26,67	1,96	
		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT (%)	6	10.109.750.234	7,35	167.395.874	5,57	1.353.490,30	7,35	59.140,90	0	235.625,70	7,35	294.767	131,96	21,78	7,35	167.690.641	131,96	1,66	
Rata-rata capaian kinerja (%)																38,03	20,60			71,99	7,97	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.6		PERDAGANGAN		76.820.783.932			5.260.581.051		728.898.931		459.544.800		1.188.443.731	45,83	42,80		12.027.884.462	27,80	15,93			
3.6.1		Dinas Perdagangan		76.820.783.932			5.260.581.051		728.898.931		459.544.800		1.188.443.731	45,83	42,80		12.027.884.462	27,80	15,93			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	6.836.948.392	100	1.044.795.813	100	768.602.700	25	187.234.340	25	339.938.893	50,00	527.173.233	50,00	68,59	50,00	1.571.969.046	50,00	22,99	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	6.338.731.948	100	873.111.810	100	138.672.451	25	33.048.691	25	38.350.707	50,00	71.399.398	50,00	51,49	50,00	944.511.208	50,00	14,90	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100	91.824.658	100	11.923.050	100	6.487.500	25	737.500	25	500.000	50,00	1.237.500	50,00	19,08	50,00	13.160.550	50,00	14,33	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program (Dokumen)	9	2.727.405.753	9	462.150.900	BB	253.075.200	-	116.380.000	-	18.050.000	0,00	134.430.000	0,00	53,12	0,00	596.580.900	-	21,87	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (Dokumen)	1	156.129.999	1	10.200.000	1	10.200.000	1	0,00	1	0,00	1,00	-	100,00	0,00	1,00	10.200.000	100,00	6,53	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)	82	3.068.420.629	97	508.170.400	73	248.947.500	-	144.727.500	-	17.220.000	0,00	161.947.500	0,00	65,05	0,00	670.117.900	-	21,84	
		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor (%)	33	662.710.069	23	112.411.700	21	64.307.900	-	64.207.900	-	-	0,00	64.207.900	0,00	99,84	0,00	176.619.600	-	26,65	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (%)	66,79	4.216.815.181	66	198.926.900	2	209.597.000	-	60.332.200	-	8.735.200	0,00	69.067.400	0,00	32,95	0,00	267.994.300	-	6,36	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah (%)	4	8.333.914.513	4	1.235.688.000	4	211.050.000	-	77.350.000	-	-	0,00	77.350.000	0,00	36,65	0,00	1.313.038.000	-	15,76	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan (%)	26,67	38.255.219.527	12	5.925.013.200	60	3.207.360.000	-	-	-	19.900.000	0,00	19.900.000	0,00	0,62	0,00	5.944.913.200	-	15,54	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra (%)	120	6.132.663.263	66	457.048.958	3	142.280.800	-	44.880.800	1	16.850.000	1,00	61.730.800	33,33	43,39	67,00	518.779.758	55,83	8,46	
Rata-rata capaian kinerja (%)														45,83	42,80				27,80	15,93		
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen Pimpinan dalam Penanganan Masa Pandemi

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Refocussing anggaran beberapa kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Identifikasi Kegiatan-Kegiatan Prioritas yang mendukung capaian RPJMD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Revisi Target Program

PERINDUSTRIAN				266.728.412.396				54.368.973.000		262.106.843			-		262.106.843	0,00	8,87		9.017.426.946	17,36	0,83	
3.7.1	Dinas Perindustrian			266.728.412.396				54.368.973.000		262.106.843			-		262.106.843	0,00	8,87		9.017.426.946	17,36	0,83	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.069.764.326	85,10	768.528.812	100	2.638.420.752	0,00	58.604.912			0,00	58.604.912	0,00	2,22	0,00		827.133.724	-	6,33	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	100	142.685.293.000	100,00	456.667.013	0	15.606.895.000	0,00	7.193.573			0,00	7.193.573	0,00	0,05	0,00		463.860.586	-	0,33	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan (Dokumen)	85	3.764.988.750	100,00	271.595.125	17	872.876.000	0,00	5.672.000			0,00	5.672.000	0,00	0,65	0,00		277.267.125	-	7,36	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset (Dokumen)	10	110.920.000	2,00	11.350.000	2	28.825.000	0,00	-			0,00	-		0,00			11.350.000	-	10,23	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi (%)	20,80	20.590.170.440	10,04	2.334.606.011	13,46	6.350.674.800	0,00	8.720.000			0,00	8.720.000	0,00	0,14	10,04		2.343.326.011	48,28	11,38	
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina (%)	7,47	22.310.914.000	4,55	1.559.124.238	3,83	16.523.492.400	0,00	53.086.158			0,00	53.086.158	0,00	0,32	4,55		1.612.210.396	60,91	7,23	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi (%)	8,24	57.444.289.880	2,02	2.660.117.985	5,02	6.457.789.548	0,00	24.645.000			0,00	24.645.000	0,00	0,38	2,02		2.684.762.985	24,51	4,67	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan (%)	12,18	2.014.105.000	0,73	323.995.025	-	2.098.336.000	0,00	-			0,00	-		0,73			323.995.025	5,99	16,09	
	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra (IKM)	90	3.858.282.000	24,00	274.882.094	70	2.974.850.000	0,00	104.185.200			0,00	104.185.200	0,00	3,50	24,00		379.067.294	26,67	9,82	
	Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (%)	2,20	879.685.000	0,97	94.453.800	-	816.813.500	0,00	-			0,00	-		0,97			94.453.800	43,97	10,74	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	1,04			20,70	7,73	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.8		TRANSMIGRASI			884.549.456				197.875.916			-		7.950.000		7.950.000				151.205.060			
3.8.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			884.549.456				197.875.916			-		7.950.000		7.950.000				151.205.060			
		Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran (%)	100	884.549.456	80	143.255.060	85	197.875.916	-	-	-	7.950.000	0,00	7.950.000	0,00	4,02	80,00	151.205.060	80,00	17,09		
4.		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			2.037.566.398.506				303.129.344.649			47.447.568.016		51.502.199.488		99.399.997.104				368.542.411.515			
4.1		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			951.527.227.707				158.642.150.424			28.795.485.224		25.282.199.689		54.527.914.513				205.084.912.736			
		Sekretariat Daerah			442.939.102.387				65.606.595.027			13.110.633.780		11.279.657.028		24.840.520.408				95.522.921.818			
4.1.1		Biro Umum			158.240.694.703				25.079.772.213			6.491.414.054		6.018.174.421		12.509.588.475				39.922.044.389			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	88.555.970.429	99,39	16.072.152.681	100	13.627.602.099	19,79	3.737.535.004	34,12	3.552.374.352	53,91	7.289.909.356	53,91	53,49	53,91	23.362.062.037	59,90	26,38		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	90	48.769.216.139	99,66	7.815.454.630	100	8.423.837.950	13,66	2.150.711.312	32,24	1.710.991.131	45,90	3.861.702.443	45,90	45,84	45,90	11.677.157.073	51,00	23,94		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	90	292.000.000	-	-			0	0			0,00	-			0,00	-	-	-		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	90	2.904.439.200	99,92	518.172.500	100	75.490.500	11,03	60.154.000	88,97	15.336.500	100,00	75.490.500	100,00	100,00	100,00	593.663.000	111,11	20,44		
		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	95	2.361.528.017	99,99	419.035.400	100	408.767.300	10,26	43.504.000	36,43	147.358.300	46,69	190.862.300	46,69	46,69	46,69	609.897.700	49,15	25,83		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	10	2.131.904.594	99,34	367.056.088	100	81.526.500	2,8	11.371.000	75,12	52.155.500	77,92	63.526.500	77,92	77,92	77,92	430.582.588	779,21	20,20		
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH (%)	100	13.225.636.324	99,89	2.220.584.615	100	2.462.547.864	17,67	488.138.738	24,83	539.958.638	42,50	1.028.097.376	42,50	41,75	42,50	3.248.681.991	42,50	24,56		
Rata-rata capaian kinerja (%)																61,15	60,95			62,73	24,23		
Predikat kinerja																RENDAH	RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.2		Biro Organisasi			13.193.896.726				1.395.589.193		214.800.563		245.366.400		460.166.963				2.312.612.108			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana (%)	100	1.937.576.099	90,00	339.796.908	100	363.778.854	25	-	25		50,00	-	50,00	0,00	50,00	339.796.908	50,00	17,54	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara (%)	100	1.114.206.576	100,00	219.475.838	100	209.191.676	25	-	25		50,00	-	50,00	0,00	50,00	219.475.838	50,00	19,70	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	112.323.740	90,00	20.000.000	100	21.088.721	25	-	25		50,00	-	50,00	0,00	50,00	20.000.000	50,00	17,81	
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	486.305.634	90,00	81.180.000	100	91.303.617	25	-	25		50,00	-	50,00	0,00	50,00	81.180.000	50,00	16,69	
		Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun (%)	100	70.090.014	80,00	12.370.000	100	13.159.362	25	-	25		50,00	-	50,00	0,00	50,00	12.370.000	50,00	17,65	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi (Unit)	34	1.282.551.782	9,00	196.424.457	15	840.000	-	-	1	840.000	1,00	840.000	6,67	100,00	1,00	197.264.457	2,94	15,38	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah				
					6		7		I		II			12		13=12/7x100		14=6+12			15=14/5x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16			
			Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat (%)	100				80		0			15		15,00		-	18,75	0,00	15,00		-	15,00	
		Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel (%)	100	336.200.119	75,00	54.554.700	100	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	54.554.700	-	16,23			
		Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun (%)	100	1.684.856.107	90,00	292.967.730	100	71.737.400	32	23.249.000	12	16.488.400	44,00	39.737.400	44,00	55,39	44,00	332.705.130	44,00	19,75			
		Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB (%)	100	2.328.397.592	50,00	211.850.197	75	537.689.936	25	138.689.936	15	207.100.000	40,00	345.789.936	53,33	64,31	40,00	557.640.133	40,00	23,95			
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata (%)	100	2.232.396.014	85,00	376.940.765	90	73.799.627	40	52.861.627	10	20.938.000	50,00	73.799.627	55,56	100,00	50,00	450.740.392	50,00	20,19			
		Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik (%)	100	345.957.121	80,00	61.467.421	90	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00	0,00						
		Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik (%)	100	263.314.929	70,00	46.884.550	80	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	46.884.550	-	17,81			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun (%)	100	739.721.000	-	-	100	13.000.000	-	-	-	-	0,00	-		0,00							
		Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100.000.000	-	-							0,00	-		0,00							
		Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00							
		Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi (Inovasi)	12	100.000.000	-	-							0,00	-		0,00							
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,83	31,97				33,50	18,43			
Predikat kinerja															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.3	Biro Hukum			14.566.635.834				3.182.503.000		343.139.487		762.737.417		1.105.876.904				3.464.696.506							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.979.370.120	100	521.207.185	100	436.836.000	28,67	74.909.728	34,21	116.437.528	62,88	191.347.256	62,88	43,80	62,88	712.554.441	62,88	23,92					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1.002.556.778	100	161.466.328	100	166.901.150	30,51	25.418.745	31,68	63.517.745	62,19	88.936.490	62,19	53,29	62,19	250.402.818	62,19	24,98					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD (%)	100	421.214.027	154	75.000.000	100	75.000.000	-	-	66,67	28.500.000	66,67	28.500.000	66,67	38,00	66,67	103.500.000	66,67	24,57					
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	72.448.813	100	10.750.000	100	13.585.000	50,00	2.205.000	100,00	3.675.000	100,00	5.880.000	100,00	43,28	100,00	16.630.000	100,00	22,95					

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
										8		9										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk (Dokumen)	1	6.558.864.015	1.607	1.077.337.987	100	1.740.106.910	478	158.230.294	244	357.703.494	722,00	515.933.788	70,78	29,65	2329,00	1.593.271.775	45,67	24,29	
		Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum (%)	100	3.532.182.082	311	513.058.102	100	750.073.940	23,75	82.375.720	32,92	192.903.650	56,67	275.279.370	56,67	36,70	56,67	788.337.472	56,67	22,32	
Rata-rata capaian kinerja (%)														69,87	40,79			65,68	23,84			
Predikat kinerja														SEDANG	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Tertibnya administrasi dan keuangan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :- menata administrasi dan keuangan sesuai rencana
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang.

4.1.4	Biro Pemerintahan			19.320.019.450				3.312.834.000		204.084.143		320.129.113		524.213.256	41,67	23,73		3.203.705.269	32,75	19,79	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3.271.653.195	100	579.628.153	100	609.795.895	25	91.457.469	25	116.868.772	50,00	208.326.241	50,00	34,16	50,00	787.954.394	50,00	24,08	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur (%)	100	325.738.847	100	32.408.000	100	60.000.000	25	2.635.000	25	5.785.000	50,00	8.420.000	50,00	14,03	50,00	40.828.000	50,00	12,53	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	788.512.658	100	114.650.000	100	135.400.000	25	32.000.000	25	-	50,00	32.000.000	50,00	23,63	50,00	146.650.000	50,00	18,60	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset (Dokumen)	15	62.339.676	3	11.100.000	3	23.429.000	1	12.000.000	-	-	1,00	12.000.000	33,33	51,22	4,00	23.100.000	26,67	37,06	
	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan (%)	100	406.420.990	100	71.229.300	100	251.405.319	-	-	25	86.800.000	25,00	86.800.000	25,00	34,53	0,00	158.029.300	-	38,88	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah (%)	100	1.325.420.137	98	25.541.800	100	227.346.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	25.541.800	-	1,93	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata (Kab/Kota)	10	7.118.892.325	10	1.076.936.611	10	1.080.386.000	1	39.904.415	1	6.175.200	2,00	46.079.615	20,00	4,27	1,00	1.123.016.226	10,00	15,78	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD (%)	500	3.150.063.420	98	558.928.575	100	470.679.686	15	13.737.259	50	79.187.741	65,00	92.925.000	65,00	19,74	162,76	651.853.575	32,55	20,69	
	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi (%)	100	2.870.978.200	99	209.069.574	100	454.392.100	10	12.350.000	30	25.312.400	40,00	37.662.400	40,00	8,29	10,00	246.731.974	10,00	8,59	
Rata-rata capaian kinerja (%)															41,67	23,73			32,75	19,79	
Predikat kinerja															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

4.1.5	Biro Perekonomian			11.601.565.393				1.119.142.952		501.997.597		123.375.940		625.373.537				2.311.900.298			
	Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.307.948.222	100	199.655.773	100	188.015.600,00	22,77	109.934.680,00	19,38	29.338.140,00	42,15	139.272.820	42,15	74,08	42,15	338.928.593	42,15	25,91	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	466.886.653	100	79.194.863	100	86.743.267,00	89,29	46.523.267,00	3,57	5.420.000,00	92,86	51.943.267	92,86	59,88	92,86	131.138.130	92,86	28,09	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	(%)	100	468.572.332	100	68.710.000	100	88.026.035	0	-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	68.710.000	-	14,66	
	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia		-	218.198.133	-	-	100	77.800.000	25	28.636.000	25	2.110.000	50,00	30.746.000	50,00	39,52	50,00	30.746.000		14,09	-

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16							
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	56.300.873	100	10.051.000	1	10.051.000	-	3.200.000	-	451.000	0,00	3.651.000	0,00	36,32	0,00	13.702.000	-	24,34	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD (%)	100	2.217.467.938	99	284.048.596	100	113.934.000,00	13,73	61.284.000,00	1,96	1.200.000,00	15,69	62.484.000	15,69	54,84	15,69	346.532.596	15,69	15,63	
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD (%)	100	1.104.955.744	100	135.696.960	11	48.838.800,00	4	16.241.000,00	1	1.097.800,00	5,00	17.338.800	45,45	35,50	5,00	153.035.760	5,00	13,85	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah (%)	100	3.818.152.394	100	638.720.980	6	151.391.300,00	6	131.391.700,00	-	19.999.600,00	6,00	151.391.300	100,00	100,00	6,00	790.112.280	6,00	20,69	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp.Milyar)	88410	984.383.036	100	100.162.300	1	118.421.000,00	-	17.280.000,00	-	905.000,00	0,00	18.185.000	0,00	15,36	0,00	118.347.300	-	12,02	
		Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti (%)	100	958.700.069	100	170.286.289	6	235.921.950,00	3	87.506.950,00	-	62.854.400,00	3,00	150.361.350	50,00	63,73	3,00	320.647.639	3,00	33,45	
Rata-rata capaian kinerja (%)													39,61	47,92			18,30	20,27				
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya; 2. Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.6		Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP			28.789.296.173				3.995.313.055		947.737.405		1.215.917.894		2.163.655.299	58,33	54,13		5.463.701.514	57,35	22,81	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.852.007.040	100,00	466.604.774	100	278.952.333	25	76160705	25,00	96.060.340	50,00	172.221.045	50,00	61,74	50,00	638.825.819	50,00	22,40	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	956.479.333	100,00	117.912.098	100	106.969.500	25	15.108.000	-	29.866.382	25,00	44.974.382	25,00	42,04	25,00	162.886.480	25,00	17,03	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	112.323.740	-	-	100	-		-		-	0,00	-	0,00		0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	B	514.414.650	B	90.270.000	B	81.091.000	B	20.245.000	B	1.646.000	B	21.891.000	100,00	27,00	B	112.161.000	100,00	21,80	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	61.441.086	100,00	10.840.000	100	10.740.000	25	2.325.000	25,00	2.990.000	50,00	5.315.000	50,00	49,49	50,00	16.155.000	50,00	26,29	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga (%)	98	692.655.578	98,00	251.383.100	98	232.970.000	98	187.500	98,00	132.382.500	98,00	132.570.000	100,00	56,90	98,00	383.953.100	100,00	55,43	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ (.....)	4	20.635.821.000	3,00	2.255.370.149	3	2.700.824.222	3	698.769.200	3,00	524.929.422	3,00	1.223.698.622	100,00	45,31	3,00	3.479.068.771	75,00	16,86	
		Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar) (.....)	100	2.964.153.746	29,41	107.666.094	70,59	583.766.000	29	134.942.000		428.043.250	29,41	562.985.250	41,66	96,44	58,82	670.651.344	58,82	22,63	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah		
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Rata-rata capaian kinerja (%)																58,33	54,13					57,35	22,81	
Predikat kinerja																RENDAH	RENDAH					RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya regulasi percepatan anggaran dan Koordinasi yang intens dengan Kepala SKPD

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -Adanya Refocusing covic 19 (dana rasionalisasi)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dan mencapai standarisasi yang disyaratkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -meningkatkan anggaran untuk melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dalam rangka mencapai standarisasi yang disyaratkan

4.1.7	Biro Kesejahteraan Rakyat			49.602.691.000				8.259.900.250		1.485.355.850		475.832.400		2.411.417.850				11.360.429.600			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.682.128.000	97,50	483.100.100	100,00	553.667.500,00	29,92	105.923.300,00	18,39	60.585.400,00	66,70	227.094.100	66,70	41,02	29,92	710.194.200	29,92	26,48	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	572.836.000	100,00	95.584.100	100,00	126.600.000,00	22,22	30.188.100,00	5,56	19.295.200,00	33,33	68.778.500	33,33	54,33	22,22	164.362.600	22,22	28,69	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	422.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan IPTEK Aparatur (%)	100	221.582.000	-	-	100	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	4	585.248.000	4,00	104.778.000,00	4,00	131.423.000,00	2,00	34.200.000,00	-	7.313.000,00	2,00	48.826.000	50,00	37,15	2,00	153.604.000	50,00	26,25	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	80.000.000	1,00	14.328.000,00	1,00	16.219.500,00	-	3.247.500,00	-	4.052.500,00	0,00	11.352.500	0,00	69,99	0,00	25.680.500	-	32,10	
	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan (%)	100	34.698.487.500	99,38	6.650.440.950,00	100,00	7.067.239.700,00	0,86	1.176.473.200,00	5,55	356.033.500,00	11,96	1.888.540.200	11,96	26,72	0,86	8.538.981.150	0,86	24,61	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular (%)	100	924.219.500	100,00	170.636.700,00	100,00	207.718.100,00	-	54.106.100,00	-	1.450.000,00	0,00	57.006.100	0,00	27,44	0,00	227.642.800	-	24,63	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4							8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS (%)	100	738.606.000	100,00	322.679.050,00	100,00	13.495.000,00	-	13.495.000,00	-	-	0,00	13.495.000	0,00	100,00	0,00	336.174.050	-	45,51	
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100	563.138.000	100,00	95.979.500,00	100,00	8.450.000,00	-	8.450.000,00	-	-	0,00	8.450.000	0,00	100,00	0,00	104.429.500	-	18,54	
		Program Pengendalian Penduduk dan KB.	Rasio Akseptor KB dan Penduduk (%)	75	379.854.000	-	-	100	-	-	-	-	-	0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi (%)	100	1.653.671.000	216,70	272.488.100,00	100,00	10.950.000,00	-	9.450.000,00	-	1.500.000,00	0,00	12.450.000	0,00	113,70	0,00	284.938.100	-	17,23	
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan (%)	100	149.884.000	80,00	14.010.500,00	100,00	898.700,00	-	898.700,00	-	-	0,00	898.700	0,00	100,00	80,00	14.909.200	80,00	9,95	
		Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Presentase ASN yang mengikuti IMTAQ (%)	100	868.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Manular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	100	2.682.971.000	95,00	377.047.500,00	100,00	121.839.000,00	6,25	47.524.200,00	-	25.602.800,00	6,25	73.127.000	6,25	60,02	101,25	450.174.500	101,25	16,78	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra (Kali)	5	1.963.504.000	1,00	343.243.750,00	1,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	343.243.750	20,00	17,48	
		Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	100	163.511.000	45,00	4.695.500,00	100,00	1.399.750,00	-	1.399.750,00	-	-	0,00	1.399.750	0,00	100,00	45,00	6.095.250	45,00	3,73	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif	100	252.181.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)														33,65	57,33			19,40	16,22			
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: 1) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang anggarannya di rasionalisasi; 2) Adanya pengadaan barang dan jasa yang belum terbayarkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1) Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya; 2) Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.8		Biro Humas dan Protokol			125.385.197.500				18.106.648.000		2.704.830.247		1.964.210.468		4.669.040.715				25.680.309.783			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	12.458.704.300	99	2.551.631.942	100	1.948.246.900	18	344.300.007	17	125.320.399	35,00	469.620.406	35,00	24,10	35,00	3.021.252.348	35,00	24,25	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	9.590.202.000	95	1.482.230.329	100	610.240.000	10	63.494.411	20	60.322.581	30,00	123.816.992	30,00	20,29	30,00	1.606.047.321	30,00	16,75	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)	100	307.766.000	99	43.525.000	100	57.760.000	10,50	6.050.000	-	-	10,50	6.050.000	10,50	10,47	10,50	49.575.000	10,50	16,11	
		(06.) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	2	1.110.881.000	1	131.546.000	1	150.960.000	-	-	-	65.365.000	0,00	65.365.000	0,00	43,30	0,00	196.911.000	-	17,73	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	100	40.576.048.000	99	6.992.226.339	90	6.277.780.700	17	996.015.535	13	904.797.158	30,00	1.900.812.693	33,33	30,28	30,00	8.893.039.032	30,00	21,92	
		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media (%)	100	27.801.212.540	100	4.051.293.558	90	3.448.688.000	10	387.847.494	19	638.516.550	28,40	1.026.364.044	31,56	29,76	28,40	5.077.657.602	28,40	18,26	

No	Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Terlaksananya kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Massa media (%)	100	33.425.039.960	100	5.739.652.000	90	5.573.332.000	17	901.473.700	3	164.521.180	20,00	1.065.994.880	22,22	19,13	20,00	6.805.646.880	20,00	20,36	
		Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	115.343.700	1	19.163.900	1	39.640.400	-	5.649.100	-	5.367.600	0,00	11.016.700	0,00	27,79	0,00	30.180.600	-	26,17	
Rata-rata capaian kinerja (%)																27,10	25,64			19,24	20,19	
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Perjalanan Dinas dihentikan Sementara; 2) Belanja Modal ditiadakan karena ada rasionalisasi Anggaran; 3) Belanja Barang /Jasa dan Honor dikurangi; 4) Terjadinya Wabah Corona Covid 19.
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

4.1.9	Biro Administrasi Kerjasama			22.239.105.607				1.154.892.364		217.274.434		153.912.975		371.187.409				1.803.522.351			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	2.763.453.818	98,83	933.601.768	100	183.279.808	30,00	54.257.676	15,00	23.162.975	45,00	77.420.651	45,00	42,24	45,00	1.011.022.419	45,00	36,59	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	4.049.178.560	100,00	21.239.149	100	52.793.000	25,00	6.640.202	8,00	1.250.000	33,00	7.890.202	33,00	14,95	33,00	29.129.351	33,00	0,72	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	22	980.391.219	2,00	75.016.400	2	142.400.000	-	-	2,00	49.550.000	2,00	49.550.000	100,00	34,80	2,00	124.566.400	9,09	12,71	
	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	141.482.995	1,00	8.323.000	1	32.400.000	-	1.700.000	0,00	2.550.000	0,00	4.250.000	0,00	13,12	0,00	12.573.000	-	8,89	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	150.000.000	150,00	394.154.625	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	150,00	394.154.625	150,00	262,77	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin (%)	100	3.956.366.336	-	-	100	55.104.051	92,31	47.261.051	30,77	-	123,08	47.261.051	123,08	85,77	123,08	47.261.051	123,08	1,19	
	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	4.001.427.456	-	-	100	363.915.505	22,22	57.315.505	66,67	-	88,89	57.315.505	88,89	15,75	88,89	57.315.505	88,89	1,43	
	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi (%)	100	6.196.805.222	-	-	100	325.000.000	35,71	50.100.000	7,14	77.400.000	42,86	127.500.000	42,86	39,23	42,86	127.500.000	42,86	2,06	
Rata-rata capaian kinerja (%)														54,10	30,73			61,49	40,79		
Predikat kinerja														RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

	Dewan Perwakilan rakyat Daerah			470.655.493.960				88.450.814.094		14.775.750.472		12.809.394.116		27.585.144.588				100.938.983.290			
4.1.10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			470.655.493.960				88.450.814.094		14.775.750.472		12.809.394.116		27.585.144.588				100.938.983.290			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	46.443.515.184	100,00	7.151.022.626	100	8.719.744.601	25	392.250.918	25	1.552.456.019	50	1.944.706.937	50	22,30	50	9.095.729.563	50	19,58	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	39.167.777.136	100,00	5.022.467.234	100	7.224.527.000	25	144.857.650	25	428.096.009	50	572.953.659	50	7,93	50	5.595.420.893	50	14,29	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
										1	2	3	4	5		6		7		8		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	1.978.383.875	100,00	315.458.000	100	371.440.492	25	4.247.500	25	9.168.750	50	13.416.250	50	3,61	50	328.874.250	50	16,62	
		Progam Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)			447.930.000	-	-							0	-			0	-		-	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	100	1.781.697.705	100,00	298.000.000	100	334.512.771	25	2.400.000	-	92.450.000	25	94.850.000	25	28,35	25	392.850.000	25	22,05	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	197.341.580	100,00	28.581.000	100	37.050.774	25	3.350.000	25	8.950.000	50	12.300.000	50	33,20	50	40.881.000	50	20,72	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD (%)	41,09	380.638.848.481	21.43	60.538.309.842	41	71.763.538.457	-	14.228.644.404	-	10.718.273.338	0	24.946.917.742	0	34,76	21,43	85.485.227.584	52,14	22,46	
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti (%)	88	-	-	-	90	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													37,50	21,69			46,19	19,29				
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra dan renja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: 1) Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cematnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas; 2) Refocusing anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :- Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD

4.1.1.11	Badan Penghubung Daerah			37.932.631.360				4.584.741.303		909.100.972		1.193.148.545		2.102.249.517	41,35	12,83		8.623.007.628	35,02	23,15		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	18.832.260.104	97,32	3.582.595.275	100	2.973.186.795	20,35	604.964.222	23,05	685.410.662,00	43,40	1.290.374.884	43,40	43,40	43,40	4.872.970.159	43,40	25,88		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	14.823.644.838	97,08	2.219.827.836	100	905.565.508	15,49	140.242.850	28,91	261.779.158,00	44,39	402.022.008	44,39	44,39	44,39	2.621.849.844	44,39	17,69		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	50.545.683	100,00	9.000.000	100	9.000.000	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	9.000.000	-	17,81		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	100	639.122.083	95,62	127.865.000	100	119.000.000	3,53	4.200.000	33,78	40.200.000,00	37,31	44.400.000	37,31	37,31	37,31	172.265.000	37,31	26,95		
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	116.255.071	99,62	20.700.000	100	22.200.000		5.550.000	50,00	3.700.000,00	50,00	9.250.000	50,00	41,67	50,00	29.950.000	50,00	25,76		
	Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah			550.386.328	92,92	102.880.000	100	19.097.900	26,18	5.000.000	23,56	4.500.000,00	49,74	9.500.000	49,74	49,74	142,67	112.380.000		20,42		
	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta (.....)	193.000	2.920.417.252	67.488,00	457.890.000	100	536.691.100	27,79	149.143.900	36,81	197.558.725	64,60	346.702.625	64,60	64,60	67552,60	804.592.625	35,00	27,55		
Rata-rata capaian kinerja (%)															41,35	40,16				35,02	23,15	
Predikat kinerja															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :-

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.2		PENGAWASAN		80.948.790.910				15.003.547.472		1.920.544.147		2.782.104.123		4.702.648.270	60,67	32,84		18.494.946.371	93,27	24,22			
4.2.1		Inspektorat		80.948.790.910				15.003.547.472		1.920.544.147		2.782.104.123		4.702.648.270	60,67	32,84		18.494.946.371	93,27	24,22			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	12.794.865.794	60	2.396.615.096	65	1.749.235.324	65	301.083.254	65	344.228.863	65,00	645.312.117	100,00	36,89	65,00	3.041.927.213	81,25	23,77		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	5.933.616.048	59	1.213.118.800	65	1.199.397.660	65	11.935.000	65	855.789.660	65,00	867.724.660	100,00	72,35	65,00	2.080.843.460	81,25	35,07		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	15.741.790.325	60	2.656.682.500	65	3.638.594.000	65	782.581.000	65	817.082.000	65,00	1.599.663.000	100,00	43,96	65,00	4.256.345.500	81,25	27,04		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	1.373.298.132	60	220.301.569	65	252.600.000	65	77.520.000	65	35.866.100	65,00	113.386.100	100,00	44,89	65,00	333.687.669	81,25	24,30		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	207.394.554	90	37.567.200	65	50.466.100	65	3.900.000	65	7.800.000	65,00	11.700.000	100,00	23,18	65,00	49.267.200	81,25	23,76		
		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)	90	21.563.397.925	34	3.673.934.086	75,00	2.873.922.538	69,00	560.911.593	69	445.332.000	68,93	1.006.243.593	91,91	35,01	69,00	4.680.177.679	76,67	21,70		
			- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)	4,17		2	-	35,56		97,52		91		91,30	-	256,75		93,47	-				
		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA (%)	100	3.466.513.375	93	565.615.322	77,78	585.651.400	-	73.180.000	-	74.687.500	0,00	147.867.500	0,00	25,25	93,48	713.482.822	93,48	20,58		
		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur (%)	100	618.560.099	61	94.925.200	37,77	189.900.000	-	-	-	90.000.000	0,00	90.000.000	0,00	47,39	60,87	184.925.200	60,87	29,90		
		Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	Managed (Level IV)	2.544.136.091	82	376.091.783	75	288.331.300	-	29.963.300	-	111.318.000	0,00	141.281.300	0,00	49,00	82,49	517.373.083		20,34		
			Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi (%)	63	0	55	-	57		-		52		52,00	-	91,23		107,00	-	169,84			
		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu (%)	97	16.705.218.566		71	2.557.446.545	94	4.175.449.150	25,53	79.470.000	25	-	50,86	79.470.000	54,11	1,90	121,82	2.636.916.545	125,59	15,78	
			Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK (%)	26,66			-		13.33		-		-	0,00	-			-	-				
			Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM (%)	22,22										0,00	-			-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)															60,67	32,84				93,27	24,22		
Predikat kinerja															RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Pengembangan SDM, 2. Profesionalisme SDM, 3. Ketersediaan Anggaran, 4. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Keterbatasan Anggaran, 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD, 3. Infrastruktur yang belum memadai

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : 1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM, 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan

No	Ko de	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah		
				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.3		PERENCANAAN		179.920.819.908				25.689.957.800		1.787.536.388		3.980.931.075		5.768.467.463				29.670.756.449						
4.3.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		179.920.819.908				25.689.957.800		1.787.536.388		3.980.931.075		5.768.467.463				29.670.756.449						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	44.743.231.628	100,00	6.606.086.458	100	6.979.308.737	45	950.148.645	34	1.846.512.694	79,00	2.796.661.339	79,00	40,07	79,00	9.402.747.797	79,00	21,01			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor (%)	100	8.513.489.100	100,00	1.595.423.779	100	476.350.000	100	38.103.500	100	114.116.053	100,00	152.219.553	100,00	31,96	100,00	1.747.643.332	100,00	20,53			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya (%)	70	607.677.455	99,82	19.800.000	70	343.449.500	33	6.020.000	33	3.220.000	66,00	9.240.000	94,29	2,69	66,00	29.040.000	94,29	4,78			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan (%)	100	1.361.492.800	99,74	77.767.500	100	356.063.500	17	86.808.000	33	2.642.000	50,00	89.450.000	50,00	25,12	50,00	167.217.500	50,00	12,28			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	100	564.752.535	100,32	98.921.000	100	80.740.500	100	-	100	42.258.000	100,00	42.258.000	100,00	52,34	100,00	141.179.000	100,00	25,00			
		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia (%)	100	4.499.055.784	100,21	571.985.511	100	1.360.582.000	27	56.837.400	4	162.409.124	31,00	219.246.524	31,00	16,11	31,00	791.232.035	31,00	17,59			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan RPJMD (%)	100	35.576.264.636	95,09	5.130.534.422	100	2.948.843.000	-	99.908.702	44	364.809.456	44,00	464.718.158	44,00	15,76	44,00	5.595.252.580	44,00	15,73			
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi (%)	100	15.406.865.413	97,26	1.473.889.423	100	3.462.431.800	-	144.138.950	47	175.809.100	47,00	319.948.050	47,00	9,24	47,00	1.793.837.473	47,00	11,64			
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya (%)	100	19.835.411.783	96,05	1.854.041.834	100	2.662.045.763	-	54.861.700	31	340.105.265	31,00	394.966.965	31,00	14,84	31,00	2.249.008.799	31,00	11,34			
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (%)	100	42.577.492.174	92,00	5.933.034.424	100	6.320.044.000	-	295.756.550	14	837.131.755	14,00	1.132.888.305	14,00	17,93	14,00	7.065.922.729	14,00	16,60			
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	-	1.027.606.600	99,87	540.804.635	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00	540.804.635		52,63			
		Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	80	5.207.480.000	-	-	100	700.099.000	-	54.952.941	28	91.917.628	28,00	146.870.569	28,00	20,98	28,00	146.870.569	35,00	2,82			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		56,21	22,46					56,84	17,66	
														Predikat kinerja		RENDAH	SANGAT RENDAH					RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah						
					5			6		7			I		II		12			13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.4		KEUANGAN		657.643.910.323			92.725.009.888		12.830.680.224		16.855.845.855		29.686.526.079				82.798.294.597								
4.4.1		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD		318.219.340.152			33.537.739.888		6.672.047.236		7.508.253.339		14.180.300.575				50.020.059.327								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	49.462.836.943	100	3.524.828.854	100	4.214.645.225	25	910.732.434	25	873.536.775	50,00	1.784.269.209	50,00	42,33	50	5.309.098.063	50,00	10,73				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)	100	65.753.025.944	100	2.504.718.204	100	1.312.010.220	25	169.967.630	25	274.891.045	50,00	444.858.675	50,00	33,91	50	2.949.576.879	50,00	4,49				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur (%)	100	1.933.934.001	100	92.431.800	100	54.678.858	25	9.850.000	25	14.498.858	50,00	24.348.858	50,00	44,53	50	116.780.658	50,00	6,04				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program (Dokumen)	6	5.655.795.744	6	614.575.600	6	834.538.850	1	168.883.000	1	14.096.000	2,00	182.979.000	33,33	21,93	2,00	797.554.600	33,33	14,10				
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	555.874.466	1	96.737.169	1	69.175.400	-	11.100.000	1	7.650.000	1,00	18.750.000	100,00	27,11	1,00	115.487.169	100,00	20,78				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB (Waktu)	Tepat waktu	156.387.885.866	Tepat Waktu	27.708.981.822	Tepat Waktu	21.911.170.578	Tepat Waktu	4.613.233.292	Tepat Waktu	5.554.065.167	Tepat Waktu	10.167.298.459	100,00	46,40	Tepat Waktu	37.876.280.281	100,00	24,22				
			Opini laporan keuangan Prov. NTB (Jenis)	WTP	-	WTP	-	WTP		WTP		WTP		WTP	-	100,00		WTP	-	100,00					
		Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota (Waktu)	Tepat waktu	9.343.998.554	Tepat Waktu	1.297.485.303	Tepat Waktu	914.294.340	Tepat Waktu	183.762.964	Tepat Waktu	40.914.947	Tepat Waktu	224.677.911	100,00	24,57	Tepat Waktu	1.522.163.214	100,00	16,29				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD (%)	PAD Meningkat	29.125.988.634	-	-	PAD Meningkat	4.227.226.417	PAD Meningkat	604.517.916	PAD Meningkat	728.600.547	PAD Meningkat	1.333.118.463	100,00	31,54	PAD Meningkat	1.333.118.463	100,00	4,58				
Rata-rata capaian kinerja (%)														75,93	34,04				75,93	12,65					
Predikat kinerja														SEDANG	SANGAT RENDAH				SEDANG	SANGAT RENDAH					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah																									
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Tingkat koordinasi yang belum optimal																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Evaluasi kinerja dalam periode bulanan																									
4.4.2		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			339.424.570.171				59.187.270.000		6.158.632.988		9.347.592.516		15.506.225.504				32.778.235.270						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.351.369.758	15,52	5.032.242.415	100	18.362.040.252	18,88	2.652.049.107	16,17	3.315.008.417	35,046	5.967.057.524	35,05	32,50	35,05	10.999.299.939	35,05	12,45				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	73.086.660.088	14,82	2.112.833.743	100	10.642.648.900	11,06	540.833.633	18,96	1.902.018.891	30,015	2.442.852.524	30,02	22,95	30,02	4.555.686.267	30,02	6,23				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	100	5.030.440.058	20,92	350.331.313	100	842.617.000	14	127.105.315	13,52	117.978.300	27,520	245.083.615	27,52	29,09	27,52	595.414.928	27,52	11,84				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	5	5.823.202.227	84,34	790.744.750	93	1.026.944.750	11,71	129.301.600	17	169.927.250	28,753	299.228.850	30,92	29,14	28,75	1.089.973.600	28,75	18,72				
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi (%)	85	4.135.900.529	13,09	342.497.912	13	651.593.500	1,24	64.130.000	1,47	75.872.000	2,711	140.002.000	21,49	21,49	15,80	482.499.912	15,80	11,67				

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK) (%)	56,52	162.996.997.511	49,88	8.643.359.633	47,19	27.661.425.598	49,25	2.645.213.333	67,02	3.766.787.658	67,021	6.412.000.991	142,02	23,18	116,91	15.055.360.624	116,91	9,24	
Rata-rata capaian kinerja (%)														47,83	26,39			42,34	11,69			
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD,

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaianny 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Optimal dalam perencanaan, maksimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan dapat ditekan seminim mungkin

		KEPEGAWAIAN			86.288.091.488				4.770.373.258		1.167.649.988		1.491.519.310		2.659.169.298				12.232.492.327			
4.5.1		Badan Kepegawaian Daerah			86.288.091.488				4.770.373.258		1.167.649.988		1.491.519.310		2.659.169.298				12.232.492.327			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.620.361.043	100,00	2.133.884.299	100	1.283.042.400	26,3641	396.904.012	25,06	351.867.764	51,43	748.771.776	51,43	58,36	26,36	2.882.656.075	26,36	21,16	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	20.154.220.670	100,00	3.190.691.850	100	487.456.819	53,605	255.790.870	18,74	143.925.946	72,35	399.716.816	72,35	82,00	53,61	3.590.408.666	53,61	17,81	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	194.829.459	100,00	6.373.500	100	850.000	25,00	850.000	-	-	25,00	850.000	25,00	100,00	25,00	7.223.500	25,00	3,71	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	A	1.120.738.201	100,00	197.125.125	100	183.899.100	41,46	50.780.000	-	21.600.000	41,46	72.380.000	41,46	39,36	41,46	269.505.125	41,46	24,05	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	12	129.846.244	100,00	22.971.000	100	23.400.000	25	23.400.000	25	6.800.000	50	30.200.000	50,00	129,06	25,00	53.171.000	25,00	40,95	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN (Nilai Indeks)	2,50	49.662.274.400	100,00	3.809.519.380	100,00	2.584.947.739	66,74	437.460.106	26,29	888.288.400	93,03	1.325.748.506	93,03	51,29	66,74	5.135.267.886	66,74	10,34	
			Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (%)	0,005	-			0,54						0,00				0,00				
			Kriteria Penilaian Kinerja ASN (Kriteria)	BAIK	-			Baik						0,00				0,00				
		Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN (.....)	1	1.405.821.471	100,00	212.757.875	97	206.777.200	100,00	2.465.000	0,00	79.037.200	100,00	81.502.200	100,00	39,42	100,00	294.260.075	100,00	20,93	
Rata-rata capaian kinerja (%)															61,89	71,35			48,31	19,85		
Predikat kinerja															RENDAH	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program dan Kegiatan dapat Dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program dan Kegiatan dapat Dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD

4.6		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Indeks Pelayanan Publik		81.237.558.170				6.298.305.807		945.672.045		1.109.599.436		2.055.271.481				20.261.009.035			
4.6.1		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			81.237.558.170				6.298.305.807		945.672.045		1.109.599.436		2.055.271.481				20.261.009.035			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.942.266.842	100	3.275.523.093	100	2.106.980.178	25,00	342.924.293	20,00	509.477.197	45,00	852.401.490	45,00	40,46	45,00	4.127.924.583	45,00	29,61	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	16.520.309.000	100	1.809.950.097	100	178.806.725	87,10	22.526.077	100	75.262.595	100,00	97.788.672	100,00	54,69	100,00	1.907.738.769	100,00	11,55	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	67.873.000	100	8.750.000	100	14.750.000	100	1.000.000	100	250.000	100,00	1.250.000	100,00	8,47	100,00	10.000.000	100,00	14,73	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
										I		II										
				5	6	7	8	9	12	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pegawai Yang Disiplin (%)	100	359.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	100	1.638.050.000	100	321.248.125	100	353.801.300	50	134.477.700	20	61.123.600	70,00	195.601.300	70,00	55,29	70,00	516.849.425	70,00	31,55	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK (%)	100	391.666.000	100	65.100.000	100	89.400.000	100	16.200.000	100	27.400.000	100,00	43.600.000	100,00	48,77	100,00	108.700.000	100,00	27,75	
		Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN (%)	56,25	48.317.453.329	12	12.725.166.239	0,18	3.554.567.604	0,13	428.543.975	-	436.086.044	0,13	864.630.019	72,22	24,32	11,98	13.589.796.258	21,30	28,13	
Rata-rata capaian kinerja (%)														69,60	38,67			72,72	23,89			
Predikat kinerja														SEDANG	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Merencanakan ulang kegiatan- kegiatan yang masih tertunda sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya revisi dan recofusing anggaran yang disebabkan adanya covid 19,sehingga semua kegiatan diklat ditunda.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melakukan rencana ulang kegiatan setelah anggaran dilakukan revisi dan recofusing akibat covid 19

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Meneliti kembali anggaran yang disusun untuk meminimalisir kesalahan, Menyusun target yang mampu dicapai oleh OPD per triwulannya.

4.7	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			16.215.748.700				2.444.109.200.000		122.583.173		157.412.800		279.995.973				2.087.461.251			
4.7.1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			16.215.748.700				2.444.109.200.000		122.583.173		157.412.800		279.995.973				2.087.461.251			
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (.....)	30	16.215.748.700	21,00	1.807.465.278	21	2.444.109.200	-	122.583.173	10	157.412.800	10,00	279.995.973	47,62	11,46	10,00	2.087.461.251	33,33	12,87	
Rata-rata capaian kinerja (%)															47,62	11,46			33,33	12,87	
Predikat kinerja															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

Disusun,

Mataram, Juli 2020

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI NTB

Disetujui,

Mataram, Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si.

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.